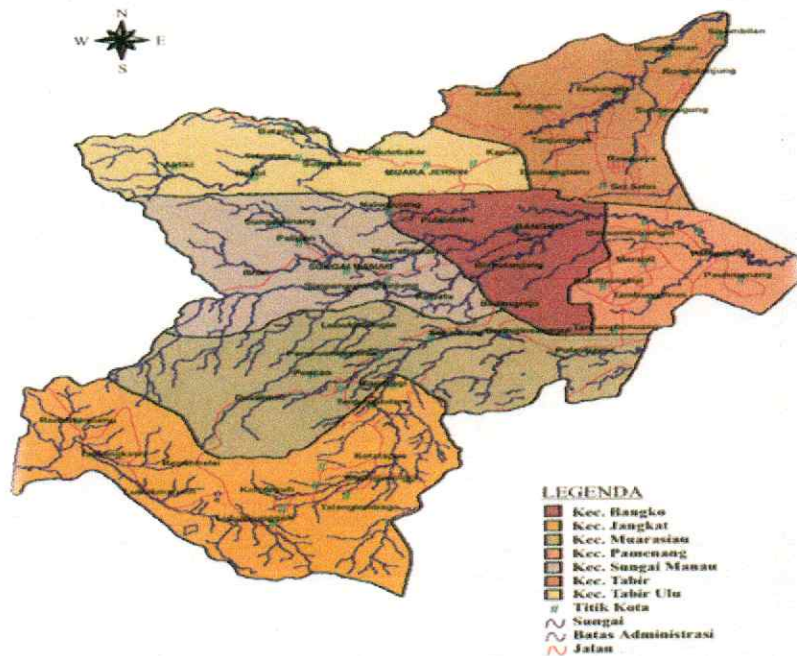




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Jln. Jendral Sudirman Km.3 Telp (0746) 21511 Fax (0746) 322494

BANGKO
2021



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
Jalan Jenderal Sudirman Km. 3 Bangko Telp&Fax. (0746) 21511
BANGKO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR : 34 TAHUN 2021

T E N T A N G

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Keuangan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 ;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

1. Menghimpun bahan/masukan sesuai dengan bidang tugasnya dari masing-masing Sekretariat, Bidang dan UPTD Dinas Peternakan dan Perkebunan serta para pelaku pembangunan Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.
 2. Mengolah dan membuat konsep Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018 – 2023.
 3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018 – 2023 kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin
- KETIGA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018 – 2023 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin ;
- KEEMPAT** : Segala Biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung APBD Tahun 2020 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : BANGKO
PADA TANGGAL : 21 Desember 2021


KEPALA DINAS,
KOPRAWI, SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19630618.198709.1.001

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas daerah Kabupaten Merangin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2021 ;

MEMUTUSKAN ;

- MENETAPKAN :** **TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018-2023**
- PERTAMA** : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 8 keputusan ini
- KEDUA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018 – 2023 mempunyai tugas dan kewajiban:

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021.
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018-
2023.
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 DESEMBER 2021

NO.	NAMA	JABATAN	Ket
1	2	3	5
1.	KOPRAWI, SP	PENANGGUNG JAWAB	
2.	ZHRIL AFIZ, SE	KOORDINATOR	
3.	SAILON, S.Pt.M.Si	KETUA	
4.	FERI ANTONI, S.Hut	SEKRETARIS	
5.	DINA IRMAYANTI, SP	ANGGOTA	
6.	MARZUAN SYAPUTRA, SP	ANGGOTA	
7.	AGUS SALIM, A.Md	ANGGOTA	
8.	YULIAN RAYA SANGON, SP	ANGGOTA	
9.	HASNIL EKA RUSTI, SE	ANGGOTA	
11.	HERMAYADI, N.S. S.Pt	ANGGOTA	

DITETAPKAN DI : BANGKO
PADA TANGGAL : 21 Desember 2021

KEPALA DINAS,

KOPRAWI, SP
PEMBINA TK.I
NIPA19630618.198709.1.001



SALINAN

**BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 19 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 – 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
DAN**

BAB VIII PENUTUP.

2. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 19-01-2022

BUPATI MERANGIN

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 20-01-2022

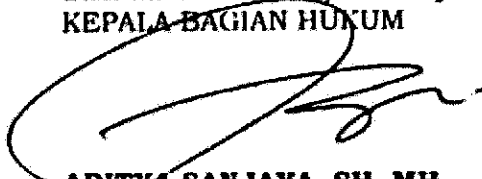
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ADITYA SANJAYA, SH.,MH
NIP. 198211072010011016

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga terlaksananya penyusunan **Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018–2023**.

Perubahan Rencana strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, diawali dengan pendahuluan, tugas dan fungsi, gambaran umum kondisi daerah, visi, misi, tujuan sasaran, strategi, program, kegiatan dan matriks lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan. Perubahan Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman dalam rangka untuk menetapkan kebijakan, serta langkah-langkah program prioritas pembangunan peternakan dan perkebunan periode tahun 2018–2023 di Kabupaten Merangin disamping itu tujuan perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin adalah sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 20121 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 – 2023.

Demikian dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan perubahan rencana strategis ini kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan masa yang akan datang.

Bangka, 12 April 2022

Kepala Dinas
Peternakan dan Perkebunan
Kabupaten Merangin



KOPRAWI, SP

Pembina Utama Muda
NIP. 19630618 198709 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GAMBAR	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin	40
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	42
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
	3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	45
	3.4. Analisa Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	52
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	55
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	55
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN INDIKATIF	60
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
BAB VIII	PENUTUP	88
LAMPIRAN		68

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1. Keadaan Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Golongan Tahun 2021	19
2.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Eselon Tahun 2021	19
2.3. Jumlah Kekuatan Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Status Pegawai 2021	19
2.4. Keadaan Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021	20
2.5. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2021 Menurut Jabatan dan Tingkat Penjurangan	20
2.6. Data Aset Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2021	21
2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2021	22
2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016	26
2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016	30
2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2017-2021	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin	42
3.2. Perubahan Misi Sesuai Perubahan Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023	44
3.3. Perubahan Tujuan Sesuai Perubahan Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023	44
3.4. Perubahan Sasaran Sesuai Perubahan Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023	45
3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	46
3.6. Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	47

3.7.	<i>Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026</i>	49
3.8.	<i>Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026</i>	49
3.9.	<i>Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Jambi serta Faktor Penghambat dan Pendorong</i>	50
3.10.	<i>Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong</i>	51
3.11.	<i>Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong</i>	52
4.1.	<i>Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>	55
4.2.	<i>Realisasi dan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023</i>	56
5.1.	<i>Perubahan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023</i>	57
5.2.	<i>Perubahan Keterkaitan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023</i>	59
6.1.	<i>Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2019-2023</i>	61
6.2.	<i>Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023</i>	65
7.1.	<i>Perubahan Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023</i>	86
7.2.	<i>Perubahan Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023</i>	87

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
2.1. <i>Struktur Organisasi Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Merangin ...</i>	18

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran</i>	<i>Halaman</i>
2.1. <i>Cascading Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023</i>	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam pasal 1 ayat (7) yang menyatakan : Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 151 ayat (1), yang berbunyi : “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra OPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD daerah dan bersifat indikatif”.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatas, diteruskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor Nomor 08 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Merangin, ditetapkan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 adalah derivasi perubahan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Merangin 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan Perubahan RPJMD. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin merupakan penjabaran program dan kegiatan jangka menengah 5 (lima) tahunan sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan dan tugas pembantuan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas hasil peternakan dan perkebunan di Kabupaten Merangin lima tahun kedepan untuk kesejahteraan masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin (Renja) sebagai masukan bagi Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Daerah, sebagai cikal bakal penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

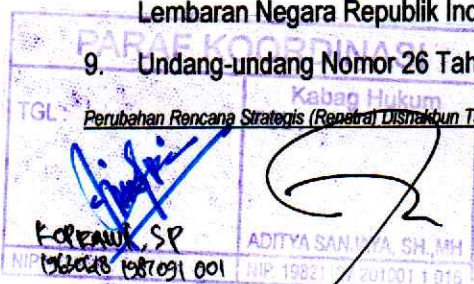


1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra OPD) Dinas Peternakan dan Perkebunan disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila, dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Disrakun Tahun 2018-2023



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 050);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 08);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 13);

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin adalah untuk Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pertanian Sub sektor Peternakan dan Perkebunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Serta Target Sasaran Pembangunan Nasional sampai dengan tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 ini bertujuan untuk :

1. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan Oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan dan Perkebunan.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan Bidang Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan dan Perkebunan.
3. Menjadi acuan kerja resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Disnakhun Tahun 2018-2023

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD.

2.2. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut Standar pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti Millenium Development Goals (MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

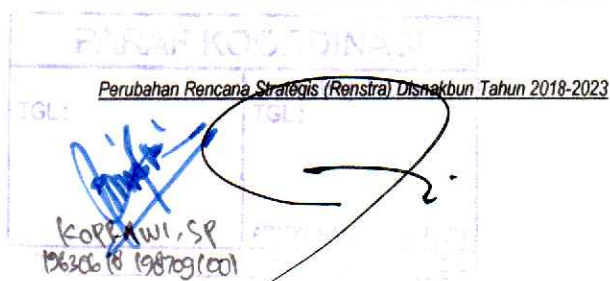
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten /Kota.

3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD pada tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

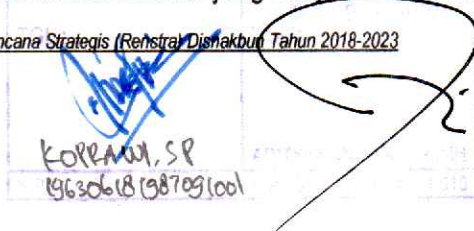
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang disajikan dalam tabel.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel.

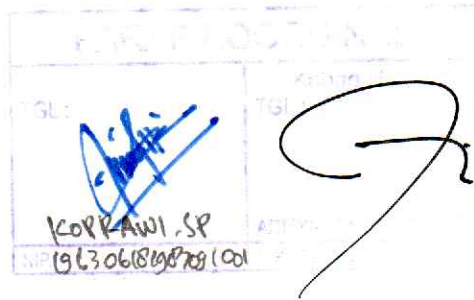


BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANIAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel.

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Merangin, ditetapkan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

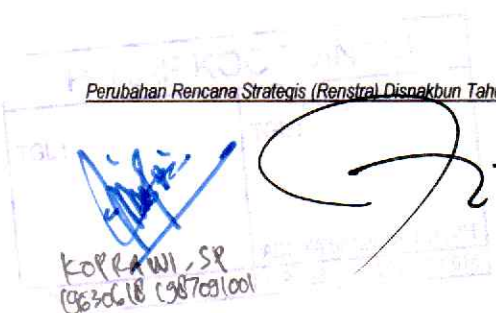
A. Tugas Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin. Dinas Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan dan tugas pembantuan.

B. Fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

- a. Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- e. Pengevaluasi Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantu di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tupoksi diatas Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dibantu oleh sekretaris Dinas dan beberapa kepala Bidang secara lengkap tertera di bawah ini :



1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan standar kompetensi jabatan dinas;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepastakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
- e. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
- g. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
- h. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Program

Bidang Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam Bidang Program.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Program mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Program;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Program;
- c. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja pada Bidang Program;
- d. Pengkoordinasian Penyusunan perencanaan bidang Program;
- e. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Strategis (RESTR) dinas;
- f. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
- g. Pengkoordinasian Penyusunan Indikator Kerja Utama (IKU) dinas;
- h. Pengkoordinasian Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- i. Melakukan perumusan, perencanaan umum, analisa komponen dan anggaran pembangunan Peternakan dan Perkebunan;

- j. Melaksanakan penyusunan rencana program jangka panjang, menengah dan jangka pendek,
- k. Melaksanakan penyusunan program pembangunan Peternakan dan Perkebunan;
- l. Melaksanakan koordinasi antara sekretariat dan bidang;
- m. Melakukan identifikasi dan perumusan potensi dibidang Peternakan dan Perkebunan;
- n. Perencanaan operasional standar pelayanan di bidang Peternakan dan Perkebunan;
- o. Penyusunan statistik dan sistem informasi di bidang Peternakan dan Keswan serta Perkebunan
- p. Melakukan peramalan dan perhitungan data statistik di bidang Peternakan dan Perkebunan;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- r. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Peternakan dan Perkebunan;
- s. Penyusunan pelaporan tahunan, lakip, program dan kegiatan pembangunan di Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertenakan dan kesehatan hewan .

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Penyusunan perencanaan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Menyusun program kegiatan, rencana kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Melakukan upaya program percepatan peningkatan populasi ternak melalui peningkatan angka kelahiran;
- g. Melaksanakan pembinaan teknologi perbibitan dan produksi peternakan baik pada ternak maupun pakan;
- h. Melaksanakan pembinaan pengembangan perbibitan dan sentra produksi peternakan;
- i. Menginventarisasi dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana peternakan;



- j. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan yang meliputi distribusi, redistribusi ternak serta administrasi;
- k. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan perbibitan dan produksi peternakan;
- l. Melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Perkebunan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Perkebunan;
- c. Penyusunan perencanaan bidang Perkebunan;
- d. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengawasan perbenihan komoditas perkebunan;
- e. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja pada Bidang Perkebunan;
- f. Melaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan teknologi produksi;
- g. Melaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan peningkatan produksi;
- h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait;
- i. Melaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sumber daya perkebunan;
- j. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan perkebunan, kebakaran;
- k. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan penanganan Gangguan Usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang lain;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan usaha, usaha pengolahan dan pemasaran.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;

KORAWI, SP
19630681987091001

- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- c. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja pada Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- d. Penyusunan perencanaan bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- e. Menyusun rencana program kegiatan dan rencana kerja bidang Kelembagaan Usaha, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan dan Perkebunan;
- f. Melaksanakan penyusunan program penyuluhan peternakan dan perkebunan;
- g. Membimbing penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- h. Melaksanakan pembinaan sistem penyuluhan, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- i. Membimbing penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- j. Melaksanakan analisa dan kelayakan usaha;
- k. Melaksanakan promosi dan pemasaran;
- l. Memberikan rekomendasi usaha;
- m. Menjalin mitra kerja bapak angkat dan peluang investasi;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan kelembagaan usaha Peternakan dan Perkebunan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

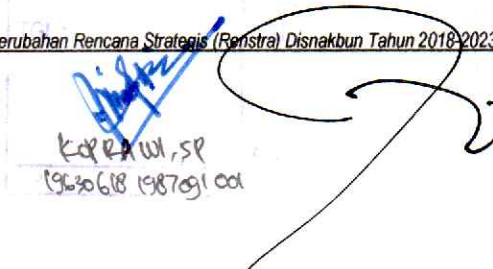
Disamping itu Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan selain dibantu oleh beberapa pejabat eselon III, juga dibantu oleh beberapa UPTD Teknis di Lapangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. UPTD Balai Pembibitan Ternak

Mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan melaksanakan penyediaan bibit ternak unggul yang berkualitas serta pelayanan pengembangan pembibitan ternak Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten di UPTD Balai Pembibitan Ternak.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Balai Pembibitan Ternak Mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan Pembinaan Terhadap UPTD Balai Pembibitan Ternak dalam mengembangkan Balai Pembibitan Ternak unggul;
- b. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja Pelayanan dan Pengembangan Balai Pembibitan Ternak;
- c. Mengkaji dan menganalisis perkembangan masing-masing ternak;
- d. Merencanakan operasional kegiatan pelayanan dan pengembangan Balai Pembibitan Ternak;
- e. Melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program serta kegiatan Balai Pembibitan Ternak ;
- f. Mengkaji evaluasi dan menganalisa perkembangan masing-masing ternak;



Edy R. W. S.P.
19630618 1987091 001

- g. Melakukan seleksi dan recording terhadap ternak yang berkualitas untuk ternak bibit;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

Mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan tentang peningkatan derajat kesehatan hewan dan pelayanan teknis operasional Dinas Pusat Kesehatan Hewan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

Untuk melaksanakan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) menjalankan Fungsi :

- a. Membangun jejaring kerja dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam meningkatkan ketanggapan *responsiveness* terhadap ancaman dari penyakit hewan atau produk pangan asal hewan dan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- b. Penanggung jawab yang membidangi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi mempunyai tugas melakukan urusan meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesmavet dan reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan di Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- c. Penanggung jawab yang membidangi epidemiologi dan informasi veteriner mempunyai tugas melakukan urusan meliputi *surveillance* dan pemetaan penyakit hewan, pengumpulan dan analisis data yang meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, pengambilan spesimen dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular (PHM), pengamatan dan pemeriksaan penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologi dan laboratorik serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan;
- d. Melaksanakan penyehatan hewan melalui pembinaan, pelayanan kesehatan hewan dan penanganan penyakit reproduksi;
- e. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Melaksanakan fungsi epidemiologik veteriner dan Inseminasi Buatan (IB);
- g. Melakukan pemetaan penyakit hewan, informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- h. Melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner di wilayah kerjanya;
- i. Melaksanakan pencegahan dan perlindungan penyakit hewan;
- j. Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan, produk asal hewan dan produk hewan non pangan;
- k. Melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana puskeswan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

3. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)

Mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Untuk melaksanakan tugas UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai fungsi :

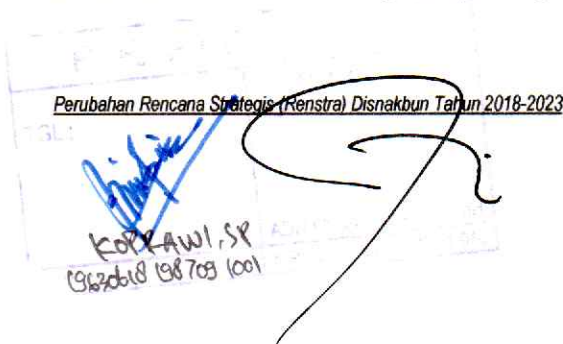
- a. Penyediaan pemotongan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) atau pemotongan yang Halal Aman Utuh dan Sehat (HAUS);
- b. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan, termasuk pengambilan sampel daging, organ-organ dan ikutannya untuk dilaksanakan uji kualitas laboratorium;
- c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dilaksanakan pemotongan (antemortem) termasuk pemeriksaan kebuntingan dan reproduksi;
- d. Melaksanakan pengawasan proses pemotongan dengan menerapkan prinsip higienis sanitasi serta memperhatikan kesejahteraan hewan;
- e. Melaksanakan pemeriksaan karkas dan ikutannya setelah pemotongan (postmortem);
- f. Melakukan penolakan pemotongan hewan dan atau penolakan daging apabila benar-benar dijumpai hewan atau daging yang tidak sehat dan membahayakan untuk dikonsumsi;
- g. Memberikan legalitas formal bahwa daging layak konsumsi;
- h. Melaksanakan pengawasan proses pengangkutan daging dari rumah potong hewan sampai tempat penjualan;
- i. Memberikan jaminan ketentraman batin masyarakat bahwa pemotongan hewan harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat;
- j. Melaksanakan pengolahan limbah Rumah Potong Hewan serta pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan

Mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan tentang Pengetahuan dan keterampilan akan Produksi Benih Tanaman Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan menjalankan Fungsi :

- a. Menyusun kebijakan teknis dalam mengembangkan Produksi Benih komoditi Perkebunan;
- b. Melaksanakan dan membina kegiatan Produksi Benih komoditi Perkebunan sekaligus dapat menjadi percontohan pembibitan yang baik dan benar pada lokasi yang telah ditentukan;
- c. Melaksanakan seluruh rangkaian proses pelabelan benih unggul yang dikembangkan;



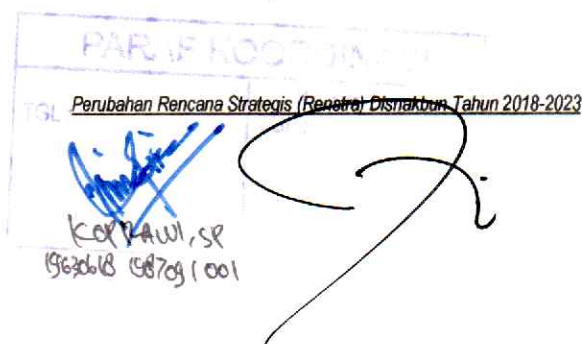
- d. Mencari informasi baru tentang komoditi perkebunan yang unggul dan mengembangkan benih komoditi perkebunan yang bermutu tinggi;
- e. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengembangkan tanaman perkebunan yang telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
- f. Menerapkan teknologi terkini dibidang pengembangan komoditi perkebunan sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman perkebunan;
- g. Membentuk tenaga terampil dibidang Produksi Benih perkebunan;
- h. Melaksanakan Koordinasi secara kontinyu dengan instansi yang terkait dengan Pembibitan Perkebunan;
- i. Mengevaluasi setiap kegiatan Produksi Benih yang dilaksanakan dan membuat pelaporan setelah pelaksanaan pembibitan selesai;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

5. UPTD Kebun Binatang

Mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan tentang Konservasi Taman Satwa dan pelayanan teknis operasional dinas di Kebun Binatang.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Kebun Binatang mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelestarian Binatang–binatang yang terdapat di Kebun Binatang;
- b. Menjaga Kesehatan Binatang Peliharaan dan menjaga agar habitatnya agar dapat berkembangbiak secara baik dan terpelihara;
- c. Memastikan bahwa Binatang Peliharaan terjaga kesehatannya dengan baik dan terpenuhinya akan kebutuhan makanan dengan cukup;
- d. Mewujudkan kebun binatang sebagai hutan kota dengan kekayaan aset taman satwa dan kemampuan konservasi yang tersertifikasi;
- e. Memperbaiki kualitas pengelolaan flora dan fauna mulai dari performance genetic potencial, envioment conditions, nutrient supply, dan management sehingga memenuhi syarat Kesejahteraan satwa;
- f. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sehingga memenuhi syarat kesejahteraan satwa dan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau hutan kota;
- g. Pengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi pengadaan dan pendistribusian;
- h. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan kebun binatang;



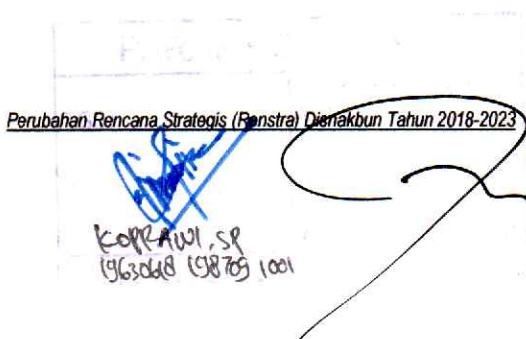
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

C. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

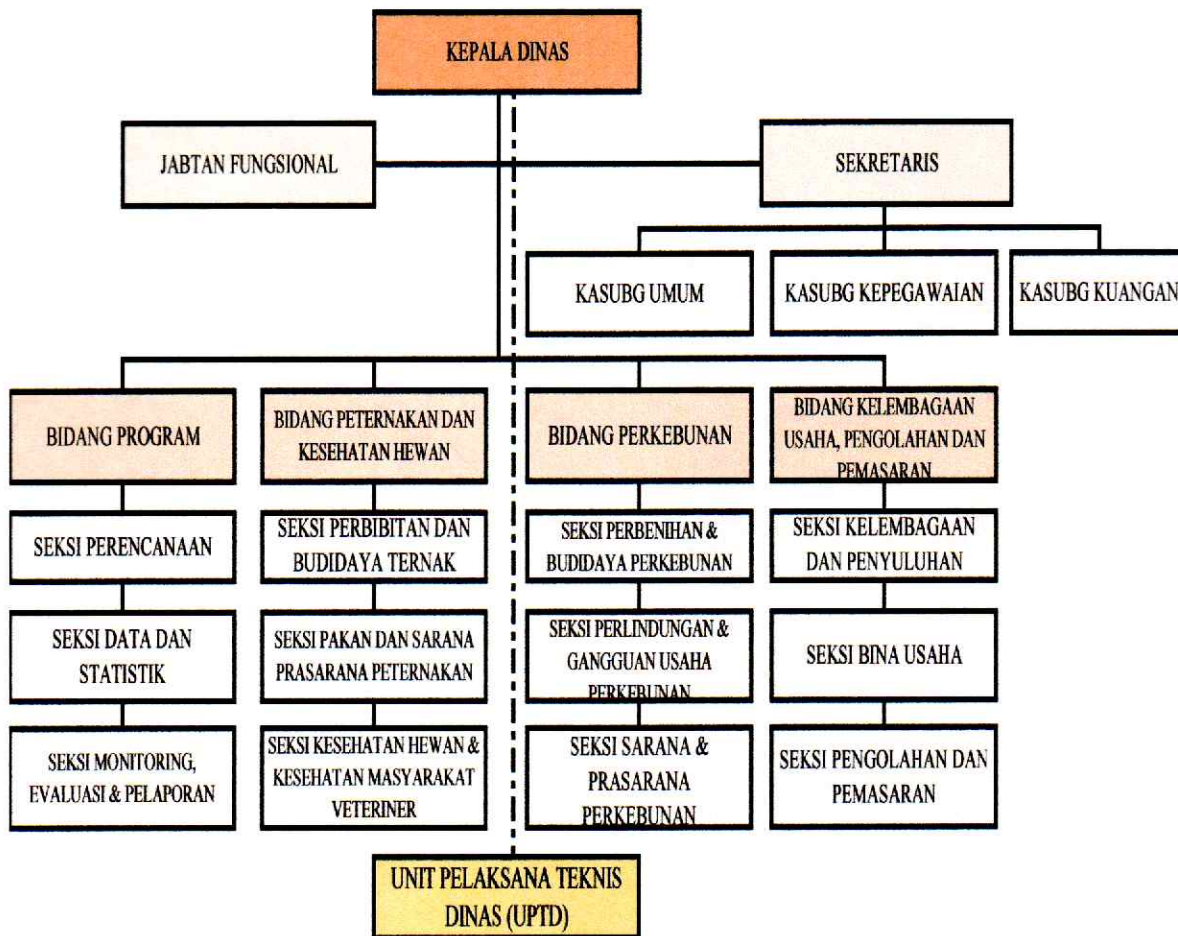
Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari tiga sub bagian, yaitu :
 - a. Sub bagian Umum
 - b. Sub bagian Kepegawaian
 - c. Sub bagian Keuangan
3. Bidang Program, terdiri dari tiga seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perencanaan
 - b. Seksi Data dan Statistik
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari tiga seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perbibitan dan Budi Daya Ternak
 - b. Seksi Pakan dan Sarana dan Prasarana Peternakan
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Bidang Perkebunan, terdiri dari tiga seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perbenihan dan Budidaya Perkebunan
 - b. Seksi Perlindungan dan Gangguan Usaha Perkebunan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan
6. Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari tiga seksi, yaitu :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
 - b. Seksi Bina Usaha
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
7. Jabatan Fungsional

Untuk uraian lebih rinci struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut ini :




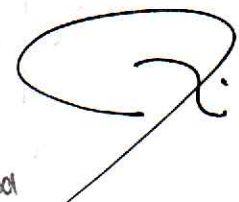
BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan Peternakan dan Perkebunan pada masa akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas. Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Peternakan dan Perkebunan saat ini pada Desember 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

TGL: 
 K. OTTAWI, SP
 19670618 198709 1001 

Tabel 2.1 : Keadaan Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah (orang)	Total Per Golongan
1	II A	1	13
2	II B	1	
3	II C	4	
4	II D	7	
9	III A	3	42
10	III B	12	
11	III C	9	
12	III D	18	
13	IV A	5	6
14	IV B	1	
15	IV C	0	
16	IV D	0	
	TOTAL	61	61

Tabel 2.2 : Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Eselon Tahun 2021

No	Jenis Eselon	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	II B	1	
2	III A	1	
3	III B	4	
4	IV A	18	
5	IV B	4	
	Jumlah	28	

Tabel 2.3. : Jumlah Kekuatan Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Status Pegawai 2021

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)
1	Organik	61
2	Kontrak Kerja	74
3	Sukarelawan	0
	Jumlah	135

Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pendidikan	Golongan																Jumlah
		I				II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	SD	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	-	-	-	-	1	3	7	2	4	-	5	-	-	-	-	22
4	D I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5	D II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	D III	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	5
7	D IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	8	1	1	-	-	23
9	S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	-	-	-	8
	Jumlah	-	-	-	-	1	1	4	8	3	12	9	16	6	1	-	-	61

Untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural yang ada di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, maka kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan maupun penjenjangan dapat diangkat pada jabatan struktural. Persyaratan penjenjangan diperoleh aparatur melalui Pendidikan dan Latihan Pimpinan (Diklatpim). Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan yang telah mengikuti Diklat Pim sampai Tahun 2021 menurut jabatan dan tingkat penjenjangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. : Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2021 Menurut Jabatan dan Tingkat Penjenjangan

No	Jabatan	Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan			Keterangan
		PIM II	PIM III	PIM IV	
1	Kepala Dinas	0	1	1	
2	Sekretaris	-	-	1	
3	Kepala Bidang	-	-	3	
4	Kasubag/Kasi	-	1	8	
5	Staf	-	-	-	
Jumlah		-	2	13	

2.2.2. Aset/Modal



Keberhasilan operasionalisasi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak akan terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana (aset) yang memadai. Sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang sangat penting guna mewujudkan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Sarana dan prasarana dimaksud diantaranya lahan, gedung tempat kerja, sarana kerja, sarana mobilitas dan sarana pendukung lainnya. Gambaran sarana dan prasarana atau aset yang ada di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ;

Tabel 2.6. : Data Aset Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2021

No	Nama Aset	Jumlah
1.	Gedung/Bangunan	97 Unit
2.	Tanah	13 Bidang
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	97 unit
4.	Peralatan dan Mesin	535 Unit
5.	Aset Tetap Lainnya	1.645 ekor
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	19 Unit
7.	Aset Lainnya	1 Unit

2.2.3. Unit Usaha yang Masih Operasional

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sebagai Dinas Teknis dalam melaksanakan pembangunan selain memiliki sumberdaya yang tersebut diatas juga mempunyai usaha

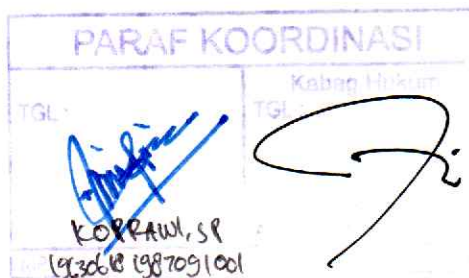


 KOPRAWI, SP
 (19630618 198703100)

yang dikelola oleh dinas Berupa Pengelolaan Ternak Bibit Sapi dan Unit Pengelolaan Pupuk Organik yang terdapat di UPTD Balai Pembibitan Ternak di Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat sudah berjalan kurang lebih tiga tahun.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Berdasarkan Indikator Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Renstra 2014-2018

Berdasarkan indikator sasaran pada renstra 2014-2018 maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin selama 5 tahun masa pembangunan namun secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Resnra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Populasi Ternak Sapi (ekor)	16.808	14.418	14.514	14.611	15.709	16.808	19.192	21.495	24.075	15.431	16.836	16.764	16.686	17.136	18.684	18.246	15.774	107.03	116.00	114.74	106.22	101.95	97.35	84.88	65.52
2	Produksi Daging (kg)	1.781.325.80	1.642.844.54	1.676.411.88	1.710.671.52	1.745.637.93	1.781.325.80	1.995.085	2.234.495	2.502.634	2.690.376	2.174.559	2.312.013	1.932.114	2.150.012	1.943.652	3.249.580	2.079.920	163.76	129.72	135.15	110.68	120.70	97.42	145.43	83.11
3	Produksi Telur (kg)	611.475.46	492.659.01	519.705.97	546.724.92	577.922.32	611.475.46	657.336	706.636	759.634	560.318	560.782	535.107	621.385	616.913	994.892	829.520	772.765	113.73	107.90	97.87	107.52	100.89	151.35	117.39	101.73
4	Kelahiran anak sapi hasil B (ekor)	850	650	700	750	800	1.048	975	2.550	1.300	943	925	955	350	933	1.000	1.177	1.129.00	145.08	132.14	127.33	43.75	89.03	102.56	46.16	86.85
5	Produktivitas Karet (Ton/ha)	0.950	0.910	0.920	0.930	0.940	0.950	1.035	1.139	1.253	0.908	0.914	0.919	0.938	0.936	0.941	0.940	0.945	99.78	99.35	98.82	99.79	98.53	0.09	0.08	0.08
6	Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/ha)	4.500	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.678	5.263	5.921	3.822	4.438	4.481	4.253	4.238	4.254	4.254	4.270	93.22	105.67	104.21	96.66	94.18	90.94	80.83	72.12
7	Produktivitas Kopi (Ton/ha)	1.55	1.100.00	1.200	1.350	1.450	1.550	1.370	1.534	1.718	1.021	1.021	1.032	1.133	1.135	1.317	1.348	1.330	92.82	85.08	76.44	78.14	73.23	96.13	87.87	77.42
8	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP) (%)	102.50	98.27	100.69	101.00	102.32	102.5	99.30	99.55	99.79	98.27	100.69	99.75	99.10	99.05	102.10	97.58		100.00	100.00	98.76	96.85	96.63	102.82	98.02	-
9	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR) (%)	100.00	97.52	98.27	98.99	99.32	100.00	97.18	97.47	97.67	97.52	98.27	98.89	105.19	96.94	99.85	109.40		100.00	100.00	100.00	105.91	96.94	102.75	112.24	-

KORAWI, SP
19620618 1987091001
ADITYA SANJAYA, SH, MH
NIP. 19821127 201001 1 016

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Resnra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun Ke-								Rasio Capaian Tahun Ke-							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Populasi Temak Sapi (ekor)	16,808	14,418	14,514	14,611	15,709	16,808	19,192	21,495	24,075	15,431	16,836	16,764	16,686	17,136	18,684	18,246	15,774	107.03	116.00	114.74	106.22	101.95	97.35	84.88	65.52
2	Produksi Daging (kg)	1,781,325.80	1,642,844.54	1,676,411.88	1,710,671.52	1,745,637.93	1,781,325.80	1,995,085	2,234,495	2,502,634	2,690,376	2,174,559	2,312,013	1,932,114	2,150,012	1,943,652	3,249,580	2,079,920	163.76	129.72	135.15	110.68	120.70	97.42	145.43	83.11
3	Produksi Telur (kg)	611,475.46	492,659.01	519,705.97	546,724.92	577,922.32	611,475.46	657,336	706,636	759,634	560,318	560,782	535,107	621,385	616,913	994,892	829,520	772,765	113.73	107.90	97.87	107.52	100.89	151.35	117.39	101.73
4	Kelahiran anak sapi hasil IB (ekor)	850	650	700	750	800	1,048	975	2,550	1,300	943	925	955	350	933	1,000	1,177	1,129.00	145.08	132.14	127.33	43.75	89.03	102.56	46.16	86.85
5	Produktivitas Karet (Ton/ha)	0.950	0.910	0.920	0.930	0.940	0.950	1,035	1,139	1,253	0.908	0.914	0.919	0.938	0.936	0.941	0.940	0.945	99.78	99.35	98.82	99.79	98.53	0.09	0.08	0.08
6	Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/ha)	4,500	4,100	4,200	4,300	4,400	4,500	4,678	5,263	5,921	3,822	4,438	4,481	4,253	4,238	4,254	4,254	4,270	93.22	105.67	104.21	96.66	94.18	90.94	80.83	72.12
7	Produktivitas Kopi (Ton/ha)	1.55	1,100.00	1,200	1,350	1,450	1,550	1,370	1,534	1,718	1,021	1,021	1,032	1,133	1,135	1,317	1,348	1,330	92.82	85.08	76.44	78.14	73.23	96.13	87.87	77.42
8	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)(%)	102.50	98.27	100.69	101.00	102.32	102.5	99.30	99.55	99.79	98.27	100.69	99.75	99.10	99.05	102.10	97.58		100.00	100.00	98.76	96.85	96.63	102.82	98.02	-
9	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR)(%)	100.00	97.52	98.27	98.89	99.32	100.00	97.18	97.47	97.67	97.52	98.27	98.89	105.19	96.94	99.85	109.40		100.00	100.00	100.00	105.91	96.94	102.75	112.24	-

KORPAWI, SP
 (9630618/198709/1001)
 ADITYA SANJAYA, SH.,MH
 NIP. 198211022010011016

Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2014-2018 telah mengalami beberapa kali reviu sehingga terjadi perubahan indikator kinerja sebagaimana dituangkan dalam tabel 2.7. pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah.

Indikator populasi ternak sapi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dimana dari semua target populasi ternak sapi tahun 2014 sampai dengan 2018 terealisasi dengan sangat baik dengan nilai rata-rata diatas 99,27% sampai dengan 116,00%, dari jumlah populasi ternak sapi yang dicapai dibanding target provinsi dan pusat memang relatif kecil, tapi dibandingkan populasi ternak sapi dengan kabupaten lain di provinsi Jambi kita termasuk cukup baik, diurutan ketiga se provinsi Jambi, keberhasilannya dikarenakan, angka kelahiran ternak sapi yang relatif tinggi, dan musibah bencana penyakit menular ternak sapi cukup mewabah tidak pernah terjadi, disamping itu minat dan animo masyarakat untuk memelihara ternak sapi juga cukup relatif tinggi, hal ini dikarenakan kondisi tanaman sawit masyarakat yang sudah tua dan sudah masanya untuk diremajakan.

Indikator produksi daging untuk renstra periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dari semua target yang telah ditetapkan telah mencapai target dengan realisasi tercapai dan melebihi dari target, capaian kinerja ini sangat baik, keberhasilan realisasi produksi daging ini disebabkan oleh tingginya permintaan daging dimasyarakat, dimana produksi daging didapat dari jumlah ternak yang dipotong di Kabupaten Merangin baik yang ada di Kabupaten Merangin maupun ternak yang didatangkan dari luar daerah Kabupaten Merangin untuk peridode renstra tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dari produksi daging di Kabupaten bila dibandingkan produksi daging produksi dan pusat memang relatif kecil, namun bila dibandingkan kabupaten lain yang ada di Provinsi Jambi tidak terlalu jauh perbedaannya.

Untuk indikator produksi telur sama halnya dengan produksi daging dari target telah ditetapkan sudah terealisasi semuanya, dari target yang ditetapkan sudah terealisasi, hal ini dikarenakan tidak terjadinya kasus penyakit ternak unggas, khususnya penyakit AI tidak terjadi wabah yang relatif cukup besar selama periode tahun 2014 – 2018, selain itu juga terjadi peningkatan jumlah populasi ternak khususnya ternak ayam buras, sedangkan ternak itik di dua tahun terakhir periode renstra tahun 2014-2018 juga terjadi peningkatan populasi.

Indikator kelahiran anak sapi hasil IB selama periode renstra tahun 2014-2018 dari target ditetapkan rata-rata sudah mencapai target atau terealisasi, pada tahun 2017 indikator kelahiran anak sapi hasil IB tidak terealisasi dari target yang ditetapkan, target tahun 2017 sebesar 800 ekor dan realisasi sebesar 350 ekor atau sebesar 41,18%, hal dikarenakan ada perubahan sistem pelaporan hasil IB, dimana sebelum pelaporan melalui SMS, dan tahun 2014 sistem Nasional tersentral disatu tempat di pusat yang membutuhkan perangkat yang lebih canggih, sedangkan sarana dan prasarana didaerah belum tersedia dimana banyak kelahiran yang tidak dilaporkan, namun secara umum kelahiran hasil tahun 2017 juga terealisasi.

Untuk sub sektor perkebunan dengan indikator komoditi strategis unggulan perkebunan yaitu tanaman kelapa sawit, karet dan kopi. Produktifitas untuk tanaman kelapa sawit dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2014-2018 dengan realisasi hampir 100% semuanya dengan rata-rata diatas 99,00%. Melihat dari target tersebut dengan capaian sangat berhasil, bila dibandingkan dengan target produktifitas kelapa sawit untuk provinsi dan pusat hampir relatif sama. Hal ini dikarenakan produksi dari tanaman kelapa sawit di Kabupaten Merangin memang relatif tinggi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Indikator produktivitas tanaman karet dari target capaian yang ditetapkan untuk periode renstra tahun 2014-2018 rata-rata sudah terealisasi, dengan realisasi rata-rata diatas 99,00%. Bila dibandingkan dengan target provinsi dan pusat memang target produktivitas kabupaten Merangin lebih kecil, tapi tidak begitu jauh selisihnya. Keberhasilan ini dikarenakan program pemerintah provinsi dan pusat selama 10 tahun terakhir menggalakkan program pemerajaan karet dimana karet di remajakan dengan bibit yang berkualitas unggul, walaupun selama beberapa tahun terakhir harga karet memang anjlok.

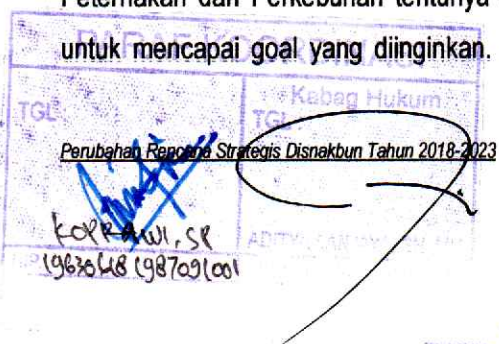
Indikator produktivitas tanaman kopi selama periode tahun 2014-2018 dari target yang telah ditetapkan rata-rata dikatakan berhasil, realisasi sebesar rata-rata 80,52%. Walaupun realisasi tidak mencapai 100%, namun realisasi ini dikatakan berhasil, namun dibandingkan dengan target provinsi dan pusat, target kabupaten relatif lebih tinggi sedikit. Mungkin karena target terlalu ini yang menyebabkan tidak tercapai 100%.

Indikator untuk kesejahteraan petani periode renstra tahun 2014-2018, sub sektor peternakan dan perkebunan adalah nilai tukar petani peternakan, capaian kinerja untuk nilai tukar petani peternakan rata-rata sangat baik atau berhasil dengan nilai sebesar antara 96,68% sampai dengan 100,00%. Nilai tukar petani peternakan bila dibandingkan dengan target provinsi dan pusat relatif sama. Keberhasilan ini dikarenakan harga komoditi sub peternakan cenderung meningkat setiap sehingga harga yang diterima petani relatif tinggi.

Indikator nilai tukar petani perkebunan, capaian kinerja untuk nilai tukar petani perkebunan rata-rata sangat baik atau berhasil dengan nilai sebesar antara 99,57% sampai dengan 105,19%. Nilai tukar petani peternakan bila dibandingkan dengan target provinsi dan pusat relatif sama. Keberhasilan ini dikarenakan harga komoditi strategis sub perkebunan selama periode tahun 2014-2018 cenderung meningkat relatif kecil atau stabil, walaupun turun tidak begitu anjlok.

2.2.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Anggaran Renstra 2014-2018

Semua pembangunan sangat erat kaitannya dengan anggaran begitu juga pembangunan Peternakan dan Perkebunan tentunya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mencapai goal yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai dasar pembangunan pada



masa yang akan datang maka perlu dilakukan evaluasi mengenai target dan realisasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan yang terjadi untuk dapat di atasi pada masa yang akan datang.

Capaian anggaran dan realisasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin selama 5 tahun masa pembangunan namun secara umum dapat digambarkan tabel berikut :



Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.278.717.000	3.755.631.000	3.954.804.634,67	-	-	3.454.395.212	3.673.120.998	3.932.826.000	-	-	1,05	0,98	0,99	-	-	6,62	4,47
BELANJA LANGSUNG	5.646.918.800	7.372.307.710	6.131.984.880	-	-	5.539.106.276	7.284.218.892	5.632.638.152	-	-	0,98	0,98	0,92	-	-	4,58	2,87
A Dinas Peternakan dan Perikanan	5.646.918.800	7.372.307.710	6.131.984.880	-	-	5.539.106.276	7.284.218.892	5.632.638.152	-	-	0,98	0,98	0,92	-	-	4,58	2,87
I Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	180.130.000,0	82.890.000,0	222.016.000,0	-	-	170.480.000,0	82.817.000,0	219.405.000,0	-	-	0,96	1,00	0,99	-	-	37,98	37,84
1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak Menular	40.000.000	71.740.000,0	174.775.000	-	-	37.500.000,0	71.667.000,0	174.615.000,0	-	-	0,94	1,00	1,00	-	-	74,32	78,25
2 Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Ternak	14.980.000	11.150.000,0	-	-	-	7.800.000,0	11.150.000,0	-	-	-	0,52	1,00	-	-	-	(41,86)	(19,02)
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana PUSKESWAN	83.500.000	-	31.400.000	-	-	83.500.000,0	-	30.350.000,0	-	-	1,00	-	0,97	-	-	(33,33)	(33,33)
4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies dan AI	41.650.000	-	15.840.000	-	-	41.650.000,0	-	14.440.000,0	-	-	1,00	-	0,91	-	-	(33,33)	(33,33)
II Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	647.434.000,0	603.966.000,0	398.644.110,0	-	-	644.430.000,0	602.165.000,0	394.104.500,0	-	-	1,00	1,00	0,99	-	-	(13,67)	(13,70)
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Pembibitan	264.167.000	-	-	-	-	263.658.000,0	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
2 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	126.448.000	133.295.000,0	145.485.000	-	-	126.148.000,0	131.995.000,0	142.869.500,0	-	-	1,00	0,99	0,98	-	-	4,85	4,29
3 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak	42.000.000	270.410.000,0	253.159.110	-	-	41.650.000,0	270.209.000,0	251.235.000,0	-	-	0,99	1,00	0,99	-	-	179,15	180,58
4 Penggemukan Sapi/Penyediaan Stock Pangan Asal Ternak Pada Hari Raya	182.354.000	200.261.000,0	-	-	-	181.604.000,0	199.961.000,0	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	(30,06)	(29,96)
5 Pembekalan Kelompok Calon Penerima Ternak Pemerintah (Pendamping SAMISAKI)	32.465.000	-	-	-	-	31.370.000,0	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Peternakan	30.606.000,0	45.825.000,0	43.330.000,0	-	-	30.605.000,0	43.780.000,0	43.190.000,0	-	-	1,00	0,96	1,00	-	-	14,76	13,90
1 Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	22.400.000	31.685.000,0	32.940.000	-	-	22.400.000,0	31.640.000,0	32.800.000,0	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	15,13	14,97
2 Lomba Kontes Ternak dan Lomba Kelompok Budidaya Perikanan	8.205.000	14.140.000,0	10.390.000	-	-	8.205.000,0	12.140.000,0	10.390.000,0	-	-	1,00	0,86	1,00	-	-	15,27	11,18
3 Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Pameran Agro Food Expo HKP dan Jambi Tuntas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	378.465.000,0	31.760.000,0	68.580.000,0	-	-	352.310.000,0	63.520.000,0	66.780.000,0	-	-	0,93	2,00	0,97	-	-	8,10	(25,61)
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	95.285.000	31.760.000,0	68.580.000	-	-	69.600.000,0	31.760.000,0	66.780.000,0	-	-	0,73	1,00	0,97	-	-	16,42	18,63
2 Pengadaan/Pembinaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Sepat Guna (RPH) dan (RPH-U)	283.180.000	-	-	-	-	282.710.000,0	31.760.000	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	(62,92)

V	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian	-	1.199.822.250,0	922.554.920,0	-	-	-	1.176.146.000,0	571.378.000,0	-	-	-	0,98	0,62	-	-	(7,70)	(17,14)
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak (DAK)	-	220.701.250,0	806.409.920,0	-	-	-	215.499.000,0	455.801.000,0	-	-	-	0,98	0,57	-	-	88,45	37,17
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Pusat Koschatan Hewan (DAK)	-	774.631.000,0	116.145.000,0	-	-	-	757.257.000,0	115.577.000,0	-	-	-	0,98	1,00	-	-	(28,33)	(28,25)
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi RPH-Ruminansia (DAK)	-	204.490.000,0	-	-	-	-	203.390.000,0	-	-	-	-	0,99	-	-	-	(33,33)	(33,33)
VI	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	42.450.000,0	24.950.000,0	21.435.000,0	-	-	42.450.000,0	24.875.000,0	21.155.000,0	-	-	1,00	1,00	0,99	-	-	(18,43)	(18,79)
1	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	42.450.000,0	24.950.000,0	21.435.000,0	-	-	42.450.000,0	24.875.000,0	21.155.000,0	-	-	1,00	1,00	0,99	-	-	(18,43)	(18,79)
VII	Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	75.000.000,0	-	-	-	74.886.000,0	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	(33,33)	(33,33)
1	Pengadaan akan dan obat-obatan satwa objek wisata	-	75.000.000,0	-	-	-	74.886.000,0	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	(33,33)	(33,33)
VIII	Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	-	64.549.000,0	-	-	-	62.999.000,0	-	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-
1	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	-	-	64.549.000,0	-	-	-	62.999.000,0	-	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-
IX	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	2.132.420.000,0	282.150.000,0	322.112.000,0	-	-	2.120.063.000,0	281.920.000,0	302.232.000,0	-	-	0,99	1,00	0,94	-	-	(24,20)	(26,50)
1	Pembinaan dan Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Lokal	91.000.000,0	92.450.000,0	102.612.000,0	-	-	91.000.000,0	92.405.000,0	102.612.000,0	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	4,19	4,19
2	Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana BBI	448.000.000,0	-	-	-	-	446.600.000,0	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
3	Pembinaan dan Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	224.820.000,0	-	12.800.000,0	-	-	224.070.000,0	-	12.800.000,0	-	-	1,00	-	1,00	-	-	(33,33)	(33,33)
4	Pengembangan Budidaya Keramba	333.075.000,0	-	206.700.000,0	-	-	332.075.000,0	-	186.820.000,0	-	-	1,00	-	0,90	-	-	(33,33)	(33,33)
5	Pengembangan Budidaya Kolam	960.525.000,0	189.700.000,0	-	-	-	956.343.000,0	189.515.000,0	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	(60,08)	(60,06)
6	Inventarisasi Potensi Perikanan, Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan	75.000.000,0	-	-	-	-	69.975.000,0	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
X	Program Pengembangan Agribisnis Perikanan	79.450.000,0	402.950.000,0	-	-	-	79.450.000,0	385.361.000,0	-	-	-	1,00	0,96	-	-	-	102,39	95,01
1	Sosialisasi Gemar Makan Ikan	79.450.000,0	402.950.000,0	-	-	-	79.450.000,0	385.361.000,0	-	-	-	1,00	0,96	-	-	-	102,39	95,01
XI	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	305.906.000,0	-	-	-	-	290.804.000,0	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
1	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Ikan Tradisional	305.906.000,0	-	-	-	-	290.804.000,0	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	(33,33)	(33,33)
XII	Pengembangan Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Perikanan	46.786.000,0	5.250.000,0	27.000.000,0	-	-	46.786.000,0	5.250.000,0	25.000.000,0	-	-	1,00	1,00	0,93	-	-	108,50	95,80
1	Penyebaran Benih Ikan (Penyediaan) Perairan Umum	46.786.000,0	5.250.000,0	27.000.000,0	-	-	46.786.000,0	5.250.000,0	25.000.000,0	-	-	1,00	1,00	0,93	-	-	108,50	95,80

NIP. 19620618 198709 1001
 NIP. 19621107 201001 1 015

XII	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan	-	2.750.715.400	2.131.328.000	-	-	-	2.674.419.000	2.115.038.000	-	-	-	0,97	0,99	-	-	(7,50)	(6,97)	
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Kewenangan Kab/Kota (DAK)	-	482.500.000	759.328.000	-	-	-	481.798.000	756.328.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	19,12	18,99	
2	Pengembangan Pembenihan Rakyat meliputi Kelompok Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan/atau Kelompok Hatchery Skala Rumah Tangga (DAK)	-	112.915.400	-	-	-	-	110.920.000	-	-	-	-	0,98	-	-	-	(33,33)	(33,33)	
3	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK)	-	1.962.800.000	1.372.900.000	-	-	-	1.896.118.000	1.358.710.000	-	-	-	0,97	0,99	-	-	(10,03)	(9,45)	
4	Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran (DAK)	-	49.500.000	-	-	-	-	49.476.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	(33,33)	(33,33)	
5	Pengadaan Sarana Public Awareness Campaign Pengawasan SDKP (DAK)	-	25.500.000	-	-	-	-	25.432.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	(33,33)	(33,33)	
6	Penyediaan Sarana Penyuluh Perikanan (DAK)	-	117.500.000	-	-	-	-	110.675.000	-	-	-	-	0,94	-	-	-	(33,33)	(33,33)	
7	Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Peningkatan Mutu (DAK)	-	-	22.107.000	-	-	-	-	14.407.000	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	
XIII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	910.054.400,0	1.060.969.310,0	1.163.042.349,7	-	-	903.243.876,0	1.038.540.842,0	1.117.295.402,0	-	-	-	0,99	0,98	0,96	-	-	8,73	7,52
1	Penyediaan Jasa Surat Menurat	300.000	900.000	315.000	-	-	300.000	900.000	165.000	-	-	-	1,00	1,00	0,52	-	-	45,00	39,44
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.400.000	83.199.000	70.800.000	-	-	57.741.960	64.443.602	66.629.011	-	-	-	0,93	0,77	0,94	-	-	6,14	4,99
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51.300.000	69.900.000	87.320.000	-	-	51.000.000	69.900.000	87.320.000	-	-	-	0,99	1,00	1,00	-	-	20,39	20,66
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.552.600	4.453.000	11.891.000	-	-	4.552.600	4.453.000	11.891.000	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	54,94	54,95
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.352.600	53.035.260	51.856.300	-	-	50.275.000	52.864.000	51.856.300	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1,03	1,08
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.973.000	25.049.250	16.843.000	-	-	25.973.000	25.049.250	15.535.000	-	-	-	1,00	1,00	0,92	-	-	(12,10)	(13,85)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.186.200	10.052.800	7.157.000	-	-	8.186.200	10.050.800	7.157.000	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	2,00	(2,01)
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	24.000.000	44.640.000	-	-	29.429.500	23.570.000	37.830.000	-	-	-	0,98	0,98	0,85	-	-	22,00	13,53
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.425.000	17.018.000	38.962.500	-	-	25.425.000	17.018.000	38.950.500	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	31,96	31,94
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	287.700.000	358.662.000	392.757.049,70	-	-	287.695.616	358.352.190	359.466.591	-	-	-	1,00	1,00	0,92	-	-	11,39	8,29
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	344.400.000	406.200.000	409.200.000	-	-	343.200.000	403.450.000	409.200.000	-	-	-	1,00	0,99	1,00	-	-	6,22	6,33
12	Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.465.000	8.500.000	31.300.500	-	-	19.465.000	8.490.000	31.295.000	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	70,63	70,74

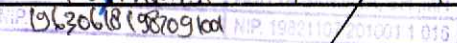
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.439.220.000	6.240.853.000	5.732.782.019,23			5.879.990.972	6.129.890.680	4.867.169.804			1,03	0,98	0,85			6,60	-3,58	
B BELANJA LANGSUNG	12.724.388.509	9.506.933.845	5.560.507.019			11.698.362.759	8.998.072.613	4.849.433.054			0,92	0,95	0,87			-22,27	(23,06)	
Dinas Perkebunan dan Kehutanan	12.724.388.509	9.506.933.845	5.560.507.019			11.698.362.759	8.998.072.613	4.849.433.054			0,92	0,95	0,87			-22,27	(23,06)	
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.088.338.000	979.883.345	1.614.743.251			1.076.077.700	932.038.340	1.874.319.354			0,99	0,95	0,97			18,51	18,51	
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	4.200.000	500.000			4.200.000	2.720.000	500.000			1,00	0,65	1,00			-29,37	(38,95)	
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	50.980.000	81.000.000	89.000.000			48.480.000	51.365.640	58.812.703			0,95	0,63	0,66			22,92	6,82	
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	27.050.000	16.200.000	7.705.400			17.534.200	14.712.800	7.371.800			0,65	0,91	0,96			-30,85	(22,15)	
4 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	110.700.000	93.600.000	76.000.000			110.700.000	93.600.000	76.000.000			1,00	1,00	1,00			-11,42	(11,42)	
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.388.000	9.800.000	3.430.000			7.388.000	9.800.000	3.430.000				1,00				-10,78	(10,78)	
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	35.204.100	20.449.900			34.655.500	35.204.100	20.449.900				1,00	1,00			-13,78	(13,44)	
7 Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	51.000.000	14.072.900	11.157.450			51.000.000	14.072.900	11.157.450								-31,04	(31,04)	
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.420.000	6.855.000	4.496.000			7.420.000	6.855.000	4.496.000			1,00	1,00	1,00			-14,01	(14,01)	
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.000.000	53.000.000	34.000.000			44.000.000	53.000.000	34.000.000			1,00					-5,13	(5,13)	
10 Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000	28.555.000	15.255.000			40.000.000	28.555.000	15.255.000			1,00	1,00	1,00			-25,06	(25,06)	
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	350.000.000	294.716.345	1.030.874.501			350.000.000	293.267.900	1.030.846.501			1,00	1,00	1,00			78,00	78,43	
12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	333.600.000	308.500.000	312.000.000			333.600.000	303.900.000	312.000.000			1,00					-2,13	(2,08)	
13 Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000	25.000.000	9.875.000			27.000.000	24.985.000				1,00	1,00				-22,64	(35,82)	
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS		9.180.000															0,00	
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	678.950.000	803.850.000	145.823.500			663.359.700	592.255.000	296.724.080			0,98	0,74				(38,40)	(38,43)	
1 Pembangunan Gedung Kantor		390.000.000					386.445.000					0,99				-33,33	-33,33	
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	289.400.000	200.150.000				282.550.000		200.150.000			0,98					-43,61	33,33	
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	61.150.000	27.650.000	18.000.000			55.252.600	27.000.000				0,90	0,98				-29,89	-50,38	
4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			10.000.000					10.000.000					1,00			0	0	
5 Pengadaan Komputer	110.300.000	43.900.000	18.000.000			109.716.100	41.940.000	17.996.000			0,99	0,96	1,00			-38,73	-39,62	
6 Pengadaan alat studio dan komunikasi		23.000.000					18.000.000					0,78				-33,33	-33,33	
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	25.500.000	10.350.000	41.300.000			25.250.000	10.350.000	11.300.000			0,99	1,00	0,27			79,87	-16,61	
8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kend.Dinas/Operasional	123.000.000	95.000.000	46.213.500			122.991.000	94.720.000	45.233.050			1,00	1,00	0,98			-24,71	-25,08	
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Perengkapan Gedung Kantor	40.800.000	13.800.000	12.310.000			40.800.000	13.800.000	12.045.000			1,00	1,00	0,98			-25,66	-26,30	
10 Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	28.800.000					26.800.000					0,93					-33,33	-33,33	

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	107.510.000	53.160.000	54.275.000	-	-	107.031.150	53.124.000	54.244.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-16,15	(16,09)	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	107.510.000	53.160.000	54.275.000	-	-	107.031.150	53.124.000	54.244.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-16,15	-16,15	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	141.500.000	37.980.000	14.425.000	-	-	141.466.000	37.980.000	14.425.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-45,06	(45,06)	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	141.500.000	37.980.000	14.425.000	-	-	141.466.000	37.980.000	14.425.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-45,06	-45,06	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	314.202.385	118.417.899	59.918.400	-	-	308.202.385	118.417.899	59.611.400	-	-	0,98	1,00	0,99	-	-	(37,24)	(37,08)	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	67.182.899	29.533.400	-	-	-	67.182.899	29.533.400	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-18,68	-18,68	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	-	8.680.000	8.280.000	-	-	-	8.680.000	7.973.000	-	-	-	1,00	0,96	-	-	-1,54	2,72	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	-	10.095.000	10.095.000	-	-	-	10.095.000	10.095.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	0,00	0,00	
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Kinerja SKPD	120.300.385	-	-	-	-	119.300.385	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-33,33	-33,33	
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	21.775.000	-	-	-	-	21.775.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-33,33	-33,33	
6	Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-33,33	-33,33	
7	Penyusunan Statistik Perkebunan	82.127.000	-	-	-	-	82.127.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-33,33	-33,33	
8	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	60.000.000	-	-	-	-	55.000.000	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-	-33,33	-33,33	
9	Penatausahaan dan penyusunan laporan aset SKPD	-	32.460.000	12.010.000	-	-	-	32.460.000	12.010.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-21,00	-21,00	
VI	Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	-	30.000.000	23.662.067	-	-	-	30.000.000	23.500.000	-	-	-	1,00	0,99	-	-	-7,04	(7,22)	
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	-	30.000.000	23.662.067	-	-	-	30.000.000	23.500.000	-	-	-	1,00	0,99	-	-	-7,04	-7,22	
VII	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	-	32.890.000	52.800.000	-	-	-	32.889.050	37.070.000	-	-	-	1,00	0,70	-	-	20,18	4,24	
1	Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	-	32.890.000	52.800.000	-	-	-	32.889.050	37.070.000	-	-	-	1,00	0,70	-	-	20,18	4,24	
VIII	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	-	66.000.000	48.950.000	-	-	-	64.941.600	48.950.000	-	-	-	0,98	1,00	-	-	-8,61	(8,21)	
1	Pengelolaan dan penyusunan statistik perkebunan	-	66.000.000	48.950.000	-	-	-	64.941.600	48.950.000	-	-	-	0,98	1,00	-	-	-8,61	-8,61	
IX	Perencanaan Pembangunan Daerah	-	50.000.000	12.881.500	-	-	-	50.000.000	12.781.500	-	-	-	1,00	0,99	-	-	-24,75	(24,81)	
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	50.000.000	12.881.500	-	-	-	50.000.000	12.781.500	-	-	-	1,00	0,99	-	-	-24,75	-24,75	
X	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	264.200.000	159.500.000	53.360.000	-	-	263.558.090	159.500.000	53.360.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	(35,39)	(34,34)	
1	Pengembangan hasil hutan non kayu	60.000.000	36.500.000	15.275.000	-	-	60.000.000	36.500.000	15.275.000	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-32,44	-32,44
2	Optimalisasi PNBK	125.000.000	80.000.000	16.110.000	-	-	124.889.090	80.000.000	16.110.000	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-38,53	-38,53
3	Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Hasil Hutan	79.200.000	43.000.000	21.975.000	-	-	78.669.000	43.000.000	21.975.000	-	-	-	0,99	1,00	1,00	-	-	-31,53	-31,53

XI	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2.975.164.772	2.826.326.250	1.639.469.000	-	-	2.097.820.150	2.649.284.550	1.399.034.000	-	-	0,71	0,94	0,85	-	-	(15,57)	(6,97)
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	133.372.772	-	-	-	-	129.709.750	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-33,33	-33,33
2	Rehabilitasi dan lahan (DAK Kehutanan Luncuran 2013)	762.330.000	500.000.000	-	-	-	483.954.000	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-44,80	-33,33
3	Pendukung DAK Kehutanan	165.000.000	-	-	-	-	161.950.000	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-33,33	-33,33
4	Rehabilitasi dan Konservasi Hutan dan Lahan (DAK Kehutanan Murni 2014)	1.914.462.000	-	-	-	-	1.806.160.400	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-33,33	-33,33
5	Pendukung pembangunan Hutan Rakyat dan pengayaan (DAK)	-	53.669.250	633.000.000	-	-	53.669.250	631.468.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	359,82	359,82
6	Pengembangan Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan (DAK)	-	135.000.000	85.809.000	-	-	106.743.000	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-12,15	-12,15
7	Pengembangan Sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK)	-	449.000.000	522.000.000	-	-	442.440.000	452.182.000	-	-	-	0,99	0,87	-	-	-	5,42	5,42
8	Pengembangan Sarana dan prasarana KPH	-	376.327.000	185.000.000	-	-	324.555.000	139.750.000	-	-	-	0,86	0,76	-	-	-	-16,95	-16,95
9	Rehabilitasi Hutan (DAK Kehutanan Luncuran)	-	262.330.000	-	-	-	202.278.300	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-33,33	-33,33
10	Penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil hutan	-	-	194.930.000	-	-	-	156.904.000	-	-	-	-	0,80	-	-	-	0,00	0,00
11	Pembangunan Hutan Rakyat dan Pengayaan	-	1.050.000.000	18.730.000	-	-	1.035.645.000	18.730.000	-	-	-	0,99	1,00	-	-	-	-32,74	-32,74
XII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	352.500.000	284.640.000	46.110.000	-	-	352.500.000	284.640.000	45.235.000	-	-	1,00	1,00	0,98	-	-	(34,35)	(34,45)
1	Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	252.500.000	192.000.000	27.375.000	-	-	252.500.000	192.000.000	26.500.000	-	-	1,00	1,00	0,97	-	-	-36,57	-36,57
2	Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Desa Renah Kemumu dan Desa Tj. Kasri	100.000.000	53.000.000	11.550.000	-	-	100.000.000	53.000.000	11.550.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-41,74	-41,74
3	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	-	39.640.000	7.185.000	-	-	39.640.000	7.185.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-27,29	-27,29
XIII	Program Pemberdayaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	70.000.000	54.000.000	-	-	-	59.500.000	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-40,95	-33,33
1	Pengawasan dan Pembinaan industri Hasil Hutan	70.000.000	54.000.000	-	-	-	59.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,95	-33,33
XIV	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	1.060.500.000	553.610.000	145.731.000	-	-	1.046.961.969	611.363.150	127.994.250	-	-	0,99	1,10	0,88	-	-	-40,49	-40,22
1	Pendamping Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat	40.000.000	-	-	-	-	39.979.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-33,33	-33,33
2	Pengembangan Hutan Desa	110.255.000	62.120.000	13.065.000	-	-	110.255.000	62.110.000	13.065.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-40,88	-40,88
3	Pembinaan Hutan Desa	50.000.000	40.200.000	8.050.000	-	-	50.000.000	40.200.000	8.050.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-33,19	-33,19
4	Penataan Areal Kerja Calon Peserta HTR	222.320.000	45.575.000	32.462.000	-	-	222.320.000	112.560.000	32.462.000	-	-	1,00	2,47	1,00	-	-	-36,09	-40,18
5	Pemutakhiran data geospasial sumberdaya hutan	79.510.000	49.460.000	10.225.000	-	-	78.260.000	45.565.000	10.225.000	-	-	0,98	0,92	1,00	-	-	-39,04	-39,78
6	Pengembangan Hutan Adat Pembinaan izin pemanfaatan hutan	105.490.000	24.100.000	-	-	-	105.490.000	24.100.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-59,05	-59,05
7	Pengembangan KPHP	200.000.000	130.000.000	-	-	-	190.121.969	124.830.150	-	-	-	0,95	0,96	-	-	-	-45	-44,78
8	Pembinaan izin penggunaan kawasan hutan	52.925.000	32.695.000	8.250.000	-	-	52.925.000	32.690.000	8.250.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-37,66	-37,67
9	Pembinaan Hutan Adat	200.000.000	70.000.000	17.736.750	-	-	197.631.000	69.998.000	-	-	-	0,99	1,00	-	-	-	-46,55	-54,86
10	Pengembangan Hutan Adat	-	49.460.000	8.350.000	-	-	-	49.330.000	8.350.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-27,71	-27,69
11	Pembinaan kelompok Tani HTR	-	50.000.000	7.775.000	-	-	-	50.000.000	7.775.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-28,15	-28,15
12	Pembinaan kelompok perhutanan hutan	-	-	4.575.000	-	-	-	4.575.000	-	-	-	-	-	1,00	-	-	0,00	0,00
13	Operasional KPH	-	-	35.242.250	-	-	-	-	35.242.250	-	-	-	-	1,00	-	-	0,00	0,00



 NIP. 196306181987091001 NIP. 198211020010011 016

XV	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	70.000.000	54.000.000	19.250.000	-	-	59.500.000	54.000.000	19.250.000	-	-	0,85	1,00	1,00	-	-	-29,07	-24,53
1	Pengawasan dan Pembinaan Industri hasil hutan	70.000.000	54.000.000	19.250.000	-	-	59.500.000	54.000.000	19.250.000	-	-	0,85	1,00	1,00	-	-	-29,07	-24,53
XVI	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	312.588.000	265.138.000	58.304.000	-	-	285.263.000	258.510.600	58.304.000	-	-	0,91	0,98	1,00	-	-	-31,06	-28,94
1	Pembinaan UPPT	109.431.000	108.431.000	19.731.000	-	-	82.431.000	108.361.000	19.731.000	-	-	0,75	1,00	1,00	-	-	-27,57	-16,78
2	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	100.707.000	80.707.000	17.323.000	-	-	100.412.000	74.167.600	17.323.000	-	-	1,00	0,92	1,00	-	-	-32,8	-34,26
3	Pengendalian kebakaran lahan dan kebun dan sosialisasi PLTB	102.450.000	76.000.000	21.250.000	-	-	102.420.000	75.982.000	21.250.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-32,62	-32,62
XVII	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	2.115.960.015	291.827.000	405.483.000	-	-	2.096.928.815	263.395.050	363.333.000	-	-	0,99	0,90	0,90	-	-	-15,75	-16,5
1	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Perkebunan	90.000.000	71.000.000	16.950.000	-	-	90.000.000	71.000.000	16.950.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-32,41	-32,41
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan	2.025.960.015	206.967.000	377.533.000	-	-	2.006.928.815	178.535.050	335.383.000	-	-	0,99	0,86	0,89	-	-	-2,46	-1,08
3	Pameran bidang pertanian Tingkat Provinsi dan Kabupaten	-	5.360.000	-	-	-	-	5.360.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-33,33	-33,33
4	Penyelenggaraan pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Emas	-	8.500.000	11.000.000	-	-	-	8.500.000	11.000.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	9,80	9,80
XVIII	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	1.944.734.500	941.895.300	667.017.500	-	-	1.931.818.000	938.650.300	661.297.500	-	-	0,99	1,00	0,99	-	-	-26,92	-26,99
1	Pendamping pengembangan karet rakyat dan pengembangan kopi	219.375.000	76.100.000	13.250.000	-	-	216.375.000	76.100.000	13.250.000	-	-	0,99	1,00	1,00	-	-	-49,3	-49,14
2	Pembibitan Kelapa Sawit	891.957.800	427.645.300	348.425.000	-	-	886.387.050	425.081.300	346.868.000	-	-	0,99	0,99	1,00	-	-	-23,53	-23,48
3	Penataan pembibitan Tj. Lamin	394.129.200	-	-	-	-	390.611.450	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-33,33	-33,33
4	Pemeliharaan Lanj. Pembibitan Kelapa Sawit	74.082.500	90.750.000	53.612.500	-	-	74.082.500	90.725.000	52.442.500	-	-	1,00	1,00	0,98	-	-	-6,14	-6,58
5	Optimalisasi kegiatan P2WKSS dan BBGRM	25.000.000	30.000.000	22.475.000	-	-	25.000.000	29.645.000	22.402.000	-	-	1,00	0,99	1,00	-	-	-1,69	-1,95
6	Pemeliharaan Kebun Pemerintah	152.040.000	96.800.000	85.250.000	-	-	151.990.000	96.648.000	85.200.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-16,09	-16,09
7	Pembinaan kelompok penerima prasarana perkebunan	47.000.000	40.750.000	57.750.000	-	-	47.000.000	40.650.000	54.880.000	-	-	1,00	1,00	0,95	-	-	9,47	7,17
8	Pembangunan prasarana dan sarana perbenihan / pembibitan tan. Perkebunan	141.150.000	-	-	-	-	140.372.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-33,33	-33,33
9	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar	-	55.575.000	12.750.000	-	-	-	55.575.000	12.750.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-25,69	-25,69
10	Fasilitasi dan pembinaan pembibitan sawit	-	34.475.000	9.875.000	-	-	-	34.475.000	9.875.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-23,79	-23,79
11	Pengelolaan dan pembibitan karet	-	55.800.000	-	-	-	-	55.755.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-33,33	-33,33
12	Peningkatan mutu karet	-	34.000.000	63.630.000	-	-	-	33.996.000	63.630.000	-	-	-	1,00	1,00	-	-	29,05	29,06

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin diperlukan dalam rangka pembangunan peternakan dan perkebunan di Kabupaten Merangin 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Gambaran pelayanan OPD	Pencapaian produksi Peternakan	Sasaran Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya unit kerja yang menangani baik dinas maupun UPTD teknis 2. Ketersediaan dukungan Anggaran 3. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas 4. Ketersediaan SDM aparatur, petugas teknis dan penyuluh di lapangan. 5. Penguatan kelembagaan pertanian. 6. Masih terbatasnya Data kelembagaan dan pelaku utama pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktifitas komoditi peternakan dan tanaman perkebunan 2. Kondisis sarana dan prasarana pendukung 3. Kelembagaan kelompok tani 4. Ancaman hama tanaman dan penyakit ternak 5. Nilai tambah dan nilai jual produk peternakan dan perkebunan rendah 6. Aksebilitas petani terhadap sarana produksi, permodalan dan pemasaran terbatas 7. Pemakaian pupuk kimia. 8. Berkembangnya penakar bibit tanaman kepala sawit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas Aparatur kurang memadai 2. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana 3. Masih rendahnya kucuran anggaran untuk sub sektor peternakan dan perkebunan 4. Rendahnya produksi dan produktivitas peternakan dan perkebunan 5. Rendahnya kualitas Pakan 6. Masih rendahnya ketersediaan benih/ bibit peternakan dan perkebunan bermutu baik Kualitas maupun kuantitas 7. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian 8. Belum optimal penanggulangan penyakit ternak dan hama tanaman perkebunan 9. Menurunnya kesuburan tanah 10. Kebun sawit masyarakat rata-rata sudah tua 11. Panjangnya tata niaga produk peternakan dan perkebunan 12. Sebagian besar pola usaha peternakan dan perkebunan skala rumah tangga 13. Masih tingginya angka pemotongan betina produktif 14. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan hasil produk peternakan yang ASUH

PARAF KOORDINATOR
 TGL :
 KORDIANI, SP
 NIP.196306181987091001

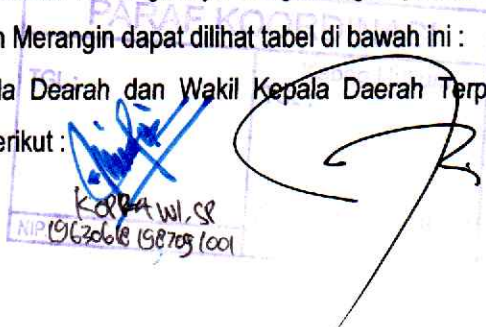
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya, maka beberapa faktor kunci yang bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Merangin yang cukup luas.
2. Keterbatasan sumber pendanaan sektor peternakan dan perkebunan menjadi titik krusial untuk mengembangkan program/kegiatan yang efektif dan efisien.
3. Harus jelasnya target /sasaran program/ kegiatan sehingga tidak terjadi salah sasaran.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan pembenihan sehingga bisa menghasilkan bibit unggul lokal dan benih unggul lokal
5. Pengembangan budidaya ternak dan tanaman perkebunan yang mampu meningkatkan produksi ternak dan perkebunan sehingga bisa secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan kebutuhan akan daging, telur dari luar daerah.
6. Peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sehingga beberapa penyakit menular baik antar ternak ataupun kepada manusia dapat dicegah dengan cepat, dan peningkatan pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan.
7. Penerapan teknologi peternakan dan perkebunan tepat guna dimasyarakat sehingga dapat memudahkan budidaya ternak maupun kebun.
8. Pengembangan pakan dan hijauan makanan ternak (HMT) sehingga pakan dan hijauan dapat terus tersedia dengan kualitas yang baik.
9. Peningkatan pemasaran hasil peternakan dan perkebunan belum maksimal.
10. Peningkatan kelembagaan peternakan dan perkebunan yang mendukung produktivitas ternak dan tanaman perkebunan.
11. Peningkatan sarana, infrastrukturpeternakan dan perkebunan guna mendukung produksi hasil peternakan dan perkebunan.
12. Peningkatan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Merangin dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dapat dilihat tabel di bawah ini :

Visi Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Merangin Tahun 2018-203 adalah sebagai berikut :



KORPORASI WIL. SP
NIP. 196306081987091001

**Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju
"Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata 2023"**

Sesuai perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) tahun misi yang semula **Misi Kelapa Daerah** menjadi **Misi Pembangunan** Kabupaten Merangin 2018-2023 seperti tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 : Perubahan Misi Sesuai Perubahan Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023.

No	Misi Sebelum Perubahan	No	Misi Setelah Perubahan
	Misi Kepala Daerah		Misi Pembangunan
1	Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata.	1 2	Mengembangkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya bidang pertanian dan pariwisata Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
2	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan		
3	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.		
4	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government.		

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berkaitan dengan dengan ke dua misi yaitu "Mengembangkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya bidang pertanian dan pariwisata dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

Sesuai dengan RPJMD awal bernama tujuan RPJMD menjadi Tujuan Utama yang berhubungan untuk "Mengembangkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya bidang pertanian dan pariwisata dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dengan tujuan sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Perubahan Tujuan Sesuai Perubahan Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023.

No	Tujuan Sebelum Perubahan	No	Tujuan Setelah Perubahan
	Tujuan RPJMD		Tujuan Utama
1	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian, Perikanan dan pariwisata.	1 2	Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian dan Pariwisata". Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
2	Mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan		
3	Mewujudkan peningkatkan kualitas sumberdaya manusia		
4	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik efektif, bersih dan melayani		

Sedangkan sasaran kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berhubungan untuk Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian dan Pariwisata” dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing antaran lain terlihat pada table berikut :

Tabel 3.4 : Perubahan Sasaran Sesuai Perubahan Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023.

No	Tujuan		Sasaran	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian, Perikanan dan pariwisata	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian dan pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian
			Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM
			Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi
			Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya lokal	Berkembangnya pariwisata berkelanjutan berbasis geopark Nasional Merangin Jambi (Geo wisata)
2	Mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan		Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat
			Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan
3	Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu kesehatan
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
			Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan Anak
			Menurunkan tingkat pengangguran	Menurunkan tingkat pengangguran
			Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
4	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik efektif, bersih dan melayani		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut antara lain :



Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi :Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju“ Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”			
Misi/Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi Ke 1 : Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata			
Sasaran : • Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan	a. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas belum optimal. b. Penerapan teknologi belum optimal. c. Penanggulangan penyakit temak dan hama tanaman perkebunan Belum optimal. d. Peran dan fungsi lembaga dalam peningkatan daya produk unggulan daerah belum optimal. e. Kualitas produk unggulan daerah belum optimal. f. Pengawasan dan pemantauan hasil produk peternakan dan perkebunan yang ASUH belum optimal.	a. Ketersediaan bibit/benih, infrastruktur, dan sarana prasarana produksi yang terbatas. b. Kualitas SDM aparatur dan petani masih rendah. c. Pengamatan dan kesiapan dalam penanggulangan penyakit dan hama tanaman. d. Kualitas sumberdaya ppeternakan dan perkebunan belum optimal. e. Input dan penerapan teknologi peternakan dan perkebunan belum optimal. f. Belum terjalannya kerjasama yang baik dengan Stakeholders produk peternakan dan perkebunan dengan Dinas Peternakan dan Perkebunan	a. Sektor Pertanian merupakan prioritas utama visi pembangunan kepala terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. b. Lokasi Kabupaten Merangin yang strategis sebagai jalur lalu lintas hasil dan pemasaran hasil pertanian dari berbagai daerah. c. Berkembangnya minat masyarakat terhadap sub sektor perkebunan dan peternakan d. Banyaknya stakeholders peternakan dan perkebunan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Pelaksanaan Urusan Pertanian di tingkat kementerian/ lembaga dilaksanakan pada Kementerian Pertanian. Visi Kementerian Pertanian yaitu “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani” dengan sasaran yang ingin dicapai terfokus pada swasembada pangan dan diversifikasi pangan. Secara umum sasaran kementerian sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Peternakan dan Perkebunan, kecuali sasaran yang mengarah pada swasembada tanaman pangan dan peningkatan produksi yang tidak menjadi fokus kegiatan di Kabupaten Merangin. Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.6. *Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.*

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula	a. Jumlah populasi temak di kabupaten relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan daging. b. Pengembangan tanaman tebu (gula) di kabupaten Merangin bukan komoditi unggulan daerah	a. Angka pemotongan temak relatif tinggi, perkembangan populasi temak relatif rendah. b. Tidak ada kegiatan pengembangan tebu	Tanaman kelapa sawit rata-rata sudah masih untuk di replanting, sehingga minat memelihara temak khususnya temak sapi meningkat
2.	Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor	a. Peran dan fungsi lembaga dalam peningkatan daya produk unggulan daerah belum optimal. b. Kualitas produk unggulan daerah belum optimal. c. Pengawasan dan pemantauan hasil produk peternakan dan perkebunan yang ASUH belum optimal	a. Kualitas sumberdaya peternakan dan perkebunan belum optimal. b. Input dan penerapan teknologi peternakan dan perkebunan belum optimal. c. Belum terjalannya kerjasama yang baik dengan Stakeholders produk peternakan dan perkebunan.	a. Lokasi Kabupaten Merangin yang strategis sebagai jalur lalu lintas hasil dan pemasaran hasil pertanian dari berbagai daerah. b. Berkembangnya minat masyarakat terhadap sub sektor perkebunan dan peternakan c. Banyaknya stakeholders peternakan dan perkebunan.
3.	Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	Belum ada penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah	Identifikasi kontrak ke pabrik kelapa sawit	
4.	Peningkatan pendapatan keluarga petani	Nilai tukar produk petani khusus peternakan dan perkebunan relatif kecil	Kualitas produk peternakan dan perkebunan relatif rendah	Harga komoditi peternakan dan perkebunan di tingkat petani relatif rendah

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Serta Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Sesuai dengan Visi Jambi Mantap 2021-2026 yaitu : **"TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT"**. Dengan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.
2. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.**

Adapun sektor pertanian sub sektor peternakan dan perkebunan terdapat misi ketiga, sedangkan tujuan dari Jambi Mantap 2021-2026 yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan dimana sub sector peternakan dan perkebunan berada pada tujuan kedua dengan rincian sebagai tujuan berikut yaitu :

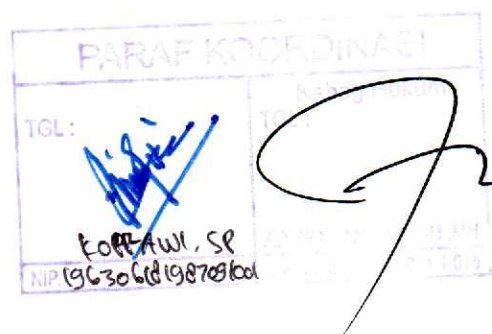
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.
2. **Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik,sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

Untuk sasaran Jambi Mantap 2021-2026 telah ditetapkan sebanyak 14 sasaran yang ingin dicapai dimana sub sektor Peternakan dan Perkebunan berapada pada sasaran ke 7 (tujuh) dank e 9 (Sembilan) adapun sasaran Jambi Mantap 2021-2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.
3. Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan.
4. Meningkatnya industri pengolahan
5. Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata.
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar.
7. **Meningkatnya kualitas lingkungan.**
8. Menurunnya tingkat pengangguran.
9. **Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan.**
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
11. Meningkatnya akses Pendidikan .
12. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan mayarakat dalam pengembangan seni dan budaya.
13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama.
14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berapa pada misi ketiga, tujuan kedua dan sasaran ke tujuh dan sembilan ada tujuan dan sasaran Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sebagai berikut :



Tabel 3.7. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

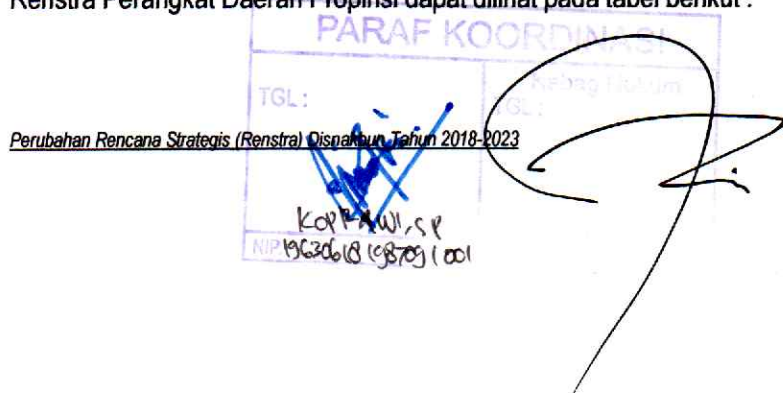
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Mewujudkan kinerja akuntabilitas, pelayanan public dan keuangan	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan DTPHP	Nilai Sakip
2	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkelanjutan	1. Tercapainya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hptrikultura 2. Tersedianya Prasarana dan Sarana TPH 3. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Pertanian dan kelembagaan petani	1. Rasio Ketersediaan Pupuk Bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk di Provinsi Jambi. 2. Rasio Pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan. 3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan. 4. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura. 5. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani dan Pelaku Usaha serta mutu dan daya saing produk hasil pertanian. 6. Jumlah penyuluh dan kelembagaan petani
3	Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) berkelanjutan	1. Tercapainya ketersediaan ternak (Sapi dan Kambing) 2. Tercapainya ketersediaan produksi daging 3. Meningkatnya status kesehatan hewan 4. Meningkatnya pelayanan keswan, kesmavet dan klinik hewan 5. Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	1. Populasi Ternak (Sapi dan Kambing) 2. Produksi Daging 3. Jumlah hewan yang terlayani (ekor) 4. Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Sampel) 5. Tersedianya bibit ternak sapi (ekor)

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi berada pada misi ketiga, tujuan kedua dan sasaran ke tujuh dan sembilan ada tujuan Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Jambi serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah :

Tabel 3.8. Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik;	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai SAKIP OPD
2	Meningkatkan daya saing subsektor perkebunan;	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta pendapatan petani	1. Jumlah produksi Komoditas Unggulan Perkebunan 2. Produktivitas Tanaman Perkebunan 3. Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan
3	Meningkatkan kemampuan SDM – aparatur, petani dan kelembagaan	Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis	NTP Sub sektor Perkebunan

Faktor–faktor penghambat dan faktor–faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.9. Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Jambi serta Faktor Penghambat dan Pendorong.

No	Sasaran Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya ketersediaan ternak (Sapi dan Kambing)	Kurangnya jumlah bantuan ternak yang bisa diberikan kepada masyarakat	Rendahnya jumlah kepemilikan ternak di masyarakat serta rendahnya ketersediaan bibit ternak yang berkualitas	Minat dan animo masyarakat untuk memelihara ternak relatif tinggi
2	Tercapainya ketersediaan produksi daging	Untuk nilai tambah sudah baik, namun jangkauan daya beli konsumen sangat rendah dengan pendapatan yang relatif kecil	Kualitas Produk peternakan masih relatif rendah	Banyaknya produk olahan peternakan yang dihasilkan
3	Meningkatnya status kesehatan hewan	Berkurangnya hasil produksi pertanian, ledakan penyakit hewan	Perubahan iklim yang signifikan mengakibatkan meningkatnya ancaman banjir, kekeringan, menurunnya kualitas pakan ternak serta meningkatnya jumlah penyakit	Animo peternak untuk mendapat pelayanan keswan dan kesmavet mulai meningkat
4	Meningkatnya pelayanan keswan, kesmavet dan klinik hewan	Peningkatan derajat kesehatan hewan masih terbatas, dengan anggaran untuk pengadaan obat dan pelayanan keswan kecil	Kesadaran peternak untuk mendapatkan pelayanan keswan yang relatif masih rendah, SDM aparatur masih kurang serta prasarana pelayanan keswan dan kesmavet masih kurang	
5	Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah ketersediaan bibit sangat terbatas, masih menggunakan sistem kawin alam, sebagian kecil yang menggunakan teknologi IB	Peternak yang menggunakan teknologi masih relatif kecil	Kualitas hasil teknologi sudah teruji
6	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta pendapatan petani	Produksi dan produktivitas komoditi utama tanaman perkebunan masih relatif rendah	Masih banyaknya beredar bibit tanaman perkebunan yang berkualitas rendah, harga pupuk yang relatif mahal	Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk tanaman perkebunan
7	Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis	Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	Belum optimalnya penanganan Pasca Panen, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perkebunan;	Tersedianya Teknologi pengolahan dan Sarana pendukung serta industry pengolahan hasil perkebunan

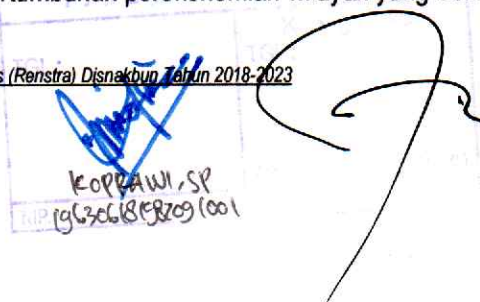
Berdasarkan data pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin masih jauh di bawah sasaran Renstra Dinas Provinsi dan Renstra Kementerian Pertanian. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Bila dilihat dari indikator kinerja yang digunakan, terlihat adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pada setiap indikator kinerja.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan RTRW pemanfaatan ruang kawasan pertanian dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Tetap terjaga kualitas lingkungan.
- b. Terciptanya pertumbuhan perekonomian wilayah yang berbasis perekonomian lokal.



KOPRAWI, SP
NP.19.6326681ER2091001

c. Pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian agar dapat mencapai optimal.

Kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Merangin juga diarahkan untuk dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan dengan luas sebesar 75% dari luas kawasan tanaman pangan berupa pertanian pangan lahan basah. Pemanfaatan ruang kawasan pertanian ini meliputi kawasan peruntukan pertanian pangan lahan basah dan kawasan peruntukan pertanian pangan lahan kering untuk lebih jelas peruntukan kawasan RTRW kabupaten untuk sektor pertanian secara umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2034 dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 3.10. : *Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.*

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan perkebunan a. Terutama Perkebunan Kelapa Sawit b. Terutama Perkebunan Karet c. Perkebunan Kopi d. Perkebunan Nilam e. Perkebunan Tembakau	a. Alih fungsi lahan perkebunan ke pemukiman b. Harga komoditi perkebunan masih berfluktuatif c. Maraknya perambahan hutan untuk lahan perkebunan	a. Pemanfaatan Lahan tidak sesuai dengan Tata Ruang b. kebijakan harga pemerintah masih lemah c. Penegakan hukum yang masih lemah	a. Sektor pertanian secara umum terus menunjukkan perkembangan b. Komoditi perkebunan merupakan kebutuhan pokok. c.
2.	Kawasan peternakan a. Peternakan Sapi b. Peternakan Kerbau c. Peternakan Kambing d. Peternakan Domba e. Peternakan Unggas	a. Lahan untuk peternakan makin relatif kecil b. Lahan untuk HMT makin relatif kecil c. Polusi udara dari kegiatan peternakan	a. Lahan peternakan tidak perlu lahan khusus b. Musim kemarau pakan HMT juga terbatas c. Lahan peternakan umumnya di sekitar perumahan	a. Komoditi peternakan merupakan kebutuhan pokok. b. Banyak lahan kosong di sekitar lahan tanaman perkebunan dan pekarangan bisa ditanam HMT. c. Lahan peternakan tidak memerlukan lahan yang luas

Dengan luas lahan perkebunan secara umum tahun 2019 sebesar \pm 210.984 Ha dan luas kawasan peternakan secara umum adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Merangin dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin tahun 2014-2034, maka dan ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati Merangin Tahun 2015 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Tahun 2015 tentang Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang memperkuat kawasan peternakan di Kabupaten Merangin.

Hal-hal yang dapat dikaji dari tabel tersebut diatas diantaranya adalah :

1. Komoditi peternakan dan perkebunan merupakan kebutuhan pokok.
2. Penyebaran ternak masih kurang terpusat di titik potensial.
3. Pengembangan perkebunan harus terus ditingkatkan.
4. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya Perkebunan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Disnaker Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan /atau Kebijakan, Rencana, dan /atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan /atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Merangin Tahun 2018, permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin serta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan pembangunan peternakan dan perkebunan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.11. : *Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.*

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan akses pemasaran hasil pertanian dan perikanan di Kabupaten Merangin	Masih rendahnya produksi dan produktivitas peternakan dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak bibit, benih peternakan dan perkebunan yang kurang rendah kualitasnya beredar dimasyarakat. - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi. - Umumnya masyarakat belum maksimal dalam pemupukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya sumber-sumber bibit, benih yang berkualitas - Banyaknya teknologi di bidang peternakan dan perkebunan untuk meningkatkan kualitas peternakan dan perkebunan - Pupuk yang digunakan umumnya pupuk ilegal

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Merangin tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian provinsi dan nasional berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2018.

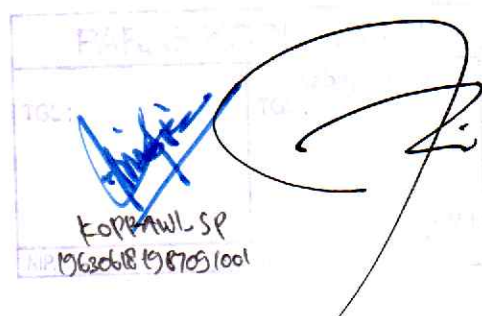
Pembangunan perekonomian tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus diperhatikan keberlangsungan (*sustainable*) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya.

Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektro-sektor tersebut terutama dalam hal penyebaran investasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan, dan kajian Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, RTRW, dan KLHS, maka dapat disusun berbagai isu strategis yang dapat dihimpun bagi pembangunan peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Merangin. Beberapa isu strategis yang dapat dihimpun bagi pembangunan peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Merangin mempunyai luas mencapai 7.679 Km² menjadi kekuatan besar menggerakkan lokomotif ekonomi Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin memiliki geografi yang bervariasi (dataran sedang sampai dataran tinggi) dimana dataran tinggi baik untuk pengembangan ternak sapi ex import daerah merupakan sumber pakan hasil dari perkebunan dan tanaman pangan yang sangat baik pengembangan ternak baik ternak besar, kecil maupun unggas. Dan dataran sedang juga pengembangan ternak sapi lokal dimana perkebunan kelapa sawit dan karet yang cukup luas dapat menghasilkan limbah hasil perkebunan dan tanaman pangan, Hijauan makanan ternak di antara tanaman perkebunan
2. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
3. Kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pembangunan Peternakan dan Perkebunan masih terbatas.
4. Sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur masih terbatas seperti kantor yang kurang nyaman, mebel yang terbatas, alat dan mesin masih kurang.
5. Belum adanya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
6. Anggaran pembangunan pertanian belum mendapat alokasi dana yang cukup untuk memacu pembangunan pertanian
7. Kecenderungan penurunan populasi ternak sapi di kabupaten Merangin semata mata tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen saja akan tetapi penanganan penerapan teknologi yang kurang maksimal dilaksanakan seperti inseminasi Buatan yang dapat meningkatkan angka kelahiran ternak.

8. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan produksi, budidaya maupun pemasaran sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya Perkebunan melalui kegiatan intensifikasi budidaya Perkebunan.
10. Sebagai sub sektor peternakan dan perkebunan merupakan bagian sektor pertanian yang merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten, untuk peternakan terjadi penurunan sumbangan PDRB bila dibandingkan PDRB provinsi dan kementerian lebih tinggi dari Kabupaten.
11. Populasi ternak sapi di kabupaten Merangin perkembangan sangat kecil bila dibandingkan dengan provinsi dan pusat.
12. Bila dilihat sumber daya alam dan SDM peternak Kabupaten Merangin merupakan potensi baik untuk pengembangan ternak sapi potong.
13. Sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten bila dibandingkan dengan Provinsi dan Pusat.
14. Sebagian besar lahan di kabupaten Merangin merupakan lahan perkebunan baik sawit, karet, kopi, kelapa dan lain-lain.
15. Untuk peternakan semua lahan bisa untuk pengembangan ternak, tapi sudah di petakan berdasarkan potensi masing-masing kecamatan.
16. Berdasarkan RT/RW kabupaten Merangin potensi wilayah pengembangan ternak sapi ada 8 (delapan) kecamatan, kerbau 11 (sebelas) kecamatan, kambing 12 kecamatan, domba 3 kecamatan dan unggas 24 kecamatan.
17. Berdasarkan RT/RW kabupaten Merangin potensi pengembangan perkebunan 16 kec. Kawasan kelapa sawit, 17 kec. Kawasan karet, 3 kec kawasan kopi, dan 3 kec. Kawasan nilam.



Handwritten signature and official stamp. The stamp contains the text: KOPPAWL SP, NIP. 196306181987031001.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

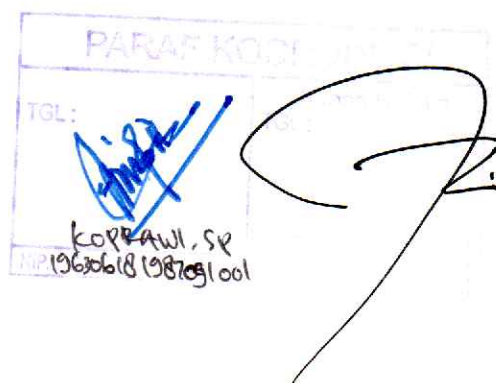
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perubahan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan dan sasaran kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Perubahan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023

No	Tujuan		Sasaran	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatnya produksi peternakan, perkebunan dan kesejahteraan petani.	Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi di Dinas Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan


Pada perubahan Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah pelaksanaan setiap kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan baik urusan peningkatan SDM aparatur, petani dan SDM pelaku usaha peternakan dan Perkebunan maupun urusan pilihan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat peternak dan pekebun. Adapun perubahan target dan realisasi indikator Tujuan dan sasaran secara terinci dan jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.2. Realisasi dan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023

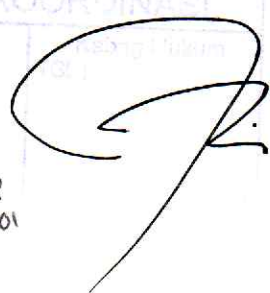
Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Realisasi Kinerja/ Sasaran			Target Kinerja/Sasaran	
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan.			Persentase pertumbuhan lapangan usaha peternakan	PDRB usaha peternakan	3,50	3,59	3,68	3,77	3,86
				Persentase pertumbuhan lapangan usaha perkebunan	PDRB usaha perkebunan	4,50	4,61	4,73	4,85	4,97
		Meningkatnya produksi peternakan, perkebunan dan kesejahteraan petani.	Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan	1. Jumlah Produksi Daging (Kg)	1. Jumlah Produksi Daging (Kg)	1.943.652	2.150.012	2.079.920	2.802.951	3.139.305
				2. Jumlah Produksi Telur (Kg)	2. Jumlah Produksi Telur (Kg)	994.892	616.913	772.765	816.607	877.852
				3. Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	3. Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	199.668	190.577	205.756	234.658	252.257
				4. Jumlah Produksi Kopi (Ton)	4. Jumlah Produksi Kopi (Ton)	9.141	8.244	10.678	12.473	13.720
				5. Jumlah Produksi Karet (Ton)	5. Jumlah Produksi Karet (Ton)	74.441	74.441	77.831	87.749,8	92.137,3
				6. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (%)		102,10	99,05			
				7. Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR) (%)		99,85	96,94			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi di Dinas Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan	Nilai Evaluasi AKIP Disnabun	Nilai SAKIP Disnabun	B	BB	BB	BB	BB
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	-	-	90%	94%	97%

PARAF KOORDINASI

TGL: 

KORRAWI, SP

NP 196306181987091001



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Peternakan dan Perkebunan tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2018-2023. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1. Perubahan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023

No	Strategi		Arah Kebijakan	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Membangun sentra-sentra produksi peternakan dan perkebunan.	Membangun sentra-sentra produksi peternakan dan perkebunan.	Peningkatan kualitas SDM petani, penyediaan benih, bibit unggul, dan penyediaan sarana produksi peternakan dan perkebunan	Peningkatan kualitas SDM petani, penyediaan benih, bibit unggul, dan penyediaan sarana produksi peternakan dan perkebunan
2	Memfasilitasi ketersediaan bibit, benih unggul dan sarana prasarana produksi sub sektor peternakan dan perkebunan.	Memfasilitasi ketersediaan bibit, benih unggul dan sarana prasarana produksi sub sektor peternakan dan perkebunan.	Peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan serta jaminan keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).	Peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan serta jaminan keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
3	Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular serta menjamin keamanan pangan asal ternak yang ASUH serta penyakit zoonosis	Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular serta menjamin keamanan pangan asal ternak yang ASUH serta penyakit zoonosis	Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT pengganggu tanaman perkebunan	Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT pengganggu tanaman perkebunan
4	Perindungan dan Pengendalian OPT pengganggu tanaman perkebunan.	Perlindungan dan Pengendalian OPT pengganggu tanaman perkebunan.	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntungkan dan menguatkan	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntungkan dan menguatkan
5	Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan dan perkebunan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan	Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan dan perkebunan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan	Pembangunan usaha peternakan dan perkebunan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perkebunan	Pembangunan usaha peternakan dan perkebunan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perkebunan
6	Pemberdayaan petani dan memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	Pemberdayaan petani dan memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	Meningkatkan sistem pelayanan di bidang peternakan dan perkebunan	Meningkatkan sistem pelayanan di bidang peternakan dan perkebunan
7	Meningkatkan sistem pelayanan di bidang peternakan dan perkebunan	Meningkatkan sistem pelayanan di bidang peternakan dan perkebunan	Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sesuai dengan ketentuan	Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sesuai dengan ketentuan

Adapun Perubahan Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin pada Misi Pembangunan adalah sebagaimana terlampir pada Tabel di bawah :

KORAWI, SP
196306101987091001

Tabel 5.2. Perubahan Keterkaitan Misi Pembangunan Terpilih dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023

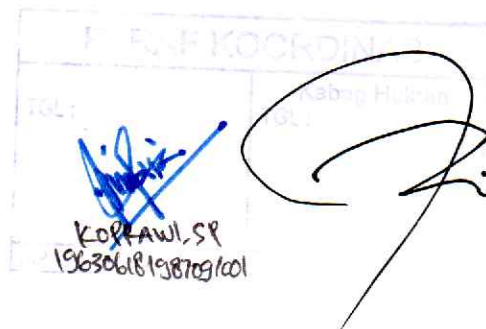
Visi : Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju "MERANGIN MANTAP UNGGUL BIDANG PERTANIAN DAN PARIWISATA 2023"									
Misi Pembangunan		Tujuan		Sasaran		Strategis		Kebijakan	
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata	Mengembangkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya bidang pertanian dan pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatnya produksi peternakan, perkebunan dan kesejahteraan petani.	Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan	Membangun sentra-sentra produksi peternakan dan perkebunan. Memfasilitasi ketersediaan bibit, benih unggul dan sarana prasarana produksi sub sektor peternakan dan perkebunan.	Membangun sentra-sentra produksi peternakan dan perkebunan. Memfasilitasi ketersediaan bibit, benih unggul dan sarana prasarana produksi sub sektor peternakan dan perkebunan.	Peningkatan kualitas SDM petani, penyediaan benih, bibit unggul, dan penyediaan sarana produksi peternakan dan perkebunan	Peningkatan kualitas SDM petani, penyediaan benih, bibit unggul, dan penyediaan sarana produksi peternakan dan perkebunan
						Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular serta menjamin keamanan pangan asal ternak yang ASUH serta penyakit zoonosis	Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular serta menjamin keamanan pangan asal ternak yang ASUH serta penyakit zoonosis	Peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan serta jaminan keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).	Peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan serta jaminan keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
						Perlindungan dan Pengendalian OPT pengganggu tanaman perkebunan.	Perlindungan dan Pengendalian OPT pengganggu tanaman perkebunan.	Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT pengganggu tanaman perkebunan	Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT pengganggu tanaman perkebunan
						Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan dan perkebunan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan	Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan dan perkebunan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntungkan dan menguatkan	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntungkan dan menguatkan
						Pemberdayaan petani dan memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	Pemberdayaan petani dan memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	Pembangunan usaha peternakan dan perkebunan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perkebunan	Pembangunan usaha peternakan dan perkebunan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perkebunan
Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi di Dinas Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi di Dinas Peternakan dan Perkebunan	Meningkatkan sistem pelayanan di bidang peternakan dan perkebunan	Meningkatkan sistem pelayanan di bidang peternakan dan perkebunan	Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sesuai dengan ketentuan	Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sesuai dengan ketentuan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023.

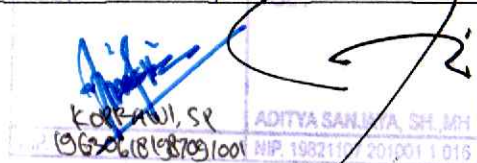
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas sangat berat terkait dengan dinamis dan kompleksnya permasalahan pembangunan Peternakan dan Perkebunan. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin berencana melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi dana direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin. Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sedangkan realisasi program kegiatan selama 2 tahun sebelumnya dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan kurun waktu tiga tahun kedepan disajikan dibawah ini dan dalam matriks tabel 6.2. di bawah ini :



The image shows a handwritten signature in blue ink over a stamp. The stamp is rectangular and contains the following text: 'KORF KORDINAN' at the top, 'Kabang Hutan' in the middle, and 'KOPRAWI, SP' and '196306181987091001' at the bottom. The signature is a large, stylized loop.

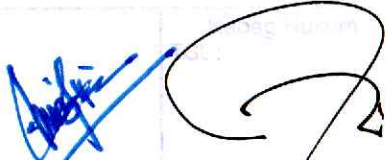
Tabel 6.1. : Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2019-2023

No	Program	Kegiatan	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
	Permendagri 13 Tahun 2006	Permendagri 13 Tahun 2006		Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	
I	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	I	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	
		2. Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keswan dan Puskeswan				b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
		3. Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH				a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman.	
		4. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner				b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	
II	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	II	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.	
		2. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat			b. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.		
		3. Penggemukan Sapi/Penyediaan Stock Pangan Asal Ternak Pada Hari Raya			1. Pengembangan Prasarana Pertanian	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.	
		4. Penilaian Petani dan Lembaga Petani Peternakan			2. Pembangunan Prasarana Pertanian	a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
		5. Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan kemampuan				b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	
		6. Pengadaan Pakan dan Sarana Prasarana Peternakan				c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
III	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	IV	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	
IV	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	1. Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Usaha Perkebunan			2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	a. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	
		2. Fasilitasi Pendampingan dan Pembinaan Peremajaan Tanaman Perkebunan			3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Masyarakat Veteriner	a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan.	
		3. Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan	b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				



 KORBAN, SR
 ADITYA SANJAYA, SH, MH
 NIP. 19821101201001 1 016

No	Program	Kegiatan	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
	Permendagri 13 Tahun 2006	Permendagri 13 Tahun 2006		Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	
		4. Promosi Atas Hasil Produksi Unggulan Daerah			4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	a. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	
		5. Fasilitasi Penyusunan RDK dan RDKK	V	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.	
		6. Pengendalian dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan				b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
		7. Pengelolaan Pembibitan Tanaman Produksi Perkebunan	VI	Program Perizinan Usaha Pertanian	1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	
		8. Dukungan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan					
		9. Penilaian Petani dan Lembaga Petani Perkebunan					
		10. Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Perkebunan					
11. Pembangunan, Perluasan dan Pemeliharaan Kebun Pemerintah							
V	Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tembakau	1. Pembinaan Kelompok Tani Tembakau dalam Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau					


 KOPRAWI, SR
 196306181987091001

No	Program	Kegiatan	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
	Permendagri 13 Tahun 2006	Permendagri 13 Tahun 2006		Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	I	Program Urusan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional				c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	
		4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	
		5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	
		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	
		7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	
		8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi				d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
		10. Penyediaan Makanan dan Minuman			3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	
		11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
		12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran			b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.		
		13. Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah			c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan Gedung Kantor			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	
		2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				b. Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor.	
		3. Pengadaan Meubeler				c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	
		4. Pengadaan Komputer				d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	
		5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	
		6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	
		8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	
		9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				c. Pengadaan Mebel.	
		10. Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor				d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	
		11. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor				e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
		f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

No	Program	Kegiatan	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket	
	Permendagri 13 Tahun 2006	Permendagri 13 Tahun 2006		Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019		
III	Program Peningkatan Disiplin	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.		
IV	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal				8. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang Undangan					c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD					d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2021	
		2. Penyusunan Laporan Keuangan OPD					a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	
		3. Penyusunan Laporan Tahunan					b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	
		4. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD					c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	
		5. Pengelolaan Data Peternakan dan Perkebunan					d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
		6. Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan						
VI	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Pemerintah	1. Penyusunan Standard Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						
VII	VII. Program Perencanaan Perangkat Daerah	1. Penyusunan Rencana Strategis OPD						
		2. Penyusunan Rencana Kerja OPD						
		3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran						
		4. Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD						



Tabel.6.2.Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Realisasi Target Capaian				Target Capaian Setelah Perubahan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp	
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan			% pertumbuhan PDRB lapangan usaha peternakan	%	3.41	3.50		3.59		3.68		3.77		3.86		3.86		
				% pertumbuhan PDRB lapangan usaha perkebunan	%	3.49	4.50		4.61		4.73		4.85		4.97		4.97		
				Produksi Daging	Kg	1.781.325,80	1.943.652		3.249.579,86		2.502.634		2.802.951		3.139.305		12.674.470		
				Produksi Telur	Kg	611.475,46	694.892		2.289.520,92		759.634		816.607		877.852		3.818.065		
				Produksi Kelapa Sawit	Ton	186.099	74.441		77.666		218.287		234.656		252.257		1.120.319		
				Produksi Karet	Ton	7.745	199.668		292.356		83.571,3		87.749,8		92.137,30		418.852		
				Produksi Kopi	Ton	72.192	9.141		11.452		11.339		12.473		13.720		56.423		
			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penurunan kasus penyakit ternak	%	9,20	9,20	257.968,850	8,90	198.629,000						9,00	456.596,850		
			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	Jumlah ternak yang divaksin dan pelayanan kesehatan ternak	Ekor	1.175	4.100	22.198,850	2.020	24.514,000						6.100	46.712,850		
			Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewan dan Puskesmas	Jumlah UPTD Puskesmas yang terbina serta sarana prasarana yang disediakan	Unit	1	1	16.000,000	0	-					1	16.000,000			
			Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH	Jumlah pemolongan ternak jantan dan betina tidak produktif di RPH	Ekor	1.500	983	93.250,000	1.162	174.114,000						2.145	267.364.000		
			Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemolongan ternak pada hari besar di luar RPH	Ekor	1	2.100	33.777,500	0	-						2.100	33.777,500		
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1. Jumlah Populasi Ternak Sapi	ekor	17.136	18.500			18.248						18.248			
				2. Jumlah Populasi Ternak Kerbau	ekor	4.449	4.425		1.632.280,000	4.195	1.306.287,782					4.195	2.838.567,782		
				3. Jumlah Populasi Ternak Kambing	ekor	34.148	43.729			40.456						40.456			
				4. Jumlah Populasi Ternak Unggas	ekor	1.741.377	2.181.576			2.134.271						2.134.271			
			Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Jumlah sarana dan prasarana pembibitan ternak yang diadakan	Unit	3	3	12.500,000	9	407.771,880					12	420.271,880			
			Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah bibit ternak yang didistribusi	Ekor	17	87	369.205,000	200	26.670,000					287	397.875,000			
			Penggemukan sapi/ penyediaan stock pangan asal ternak pada hari raya	Jumlah stock pangan hasil ternak diadakan	Ekor	-	0	0	0	-					-	-			
			Penilaian Petani dan Lembaga Petani Peternakan	Jumlah Lembaga petani dan petugas peternakan berprestasi	Orang	2	2	12.000,000	1	1.420,000					3	13.420,000			
			Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan kemampuan kelembagaan petani Peternakan	Jumlah lembaga petani peternakan yang dibatih	Kelompok	2	20	29.585,000	-	4.870,000					20	34.455,000			
			Pengadaan Pakan dan Sarana Prasarana Peternakan	Jumlah pakan dan sarana prasarana peternakan yang diadakan	Jenis	2	5	1.186.350,000	6	863.555,902					11	2.049.905,902			
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase Kelahiran Sapi Hasil IB	%	7,50	7,18	23.700,000	7,40	23.925,000					7,29	47.625,000			
			Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi IB yang diadakan	Unit	2	2	23.700,000	3	23.925,000					5	47.625,000			
			Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit	(Kg /Ha/Th)	4.253	4.254		4.254						4.254				
				Peningkatan Produktivitas Kopi	(Kg /Ha/Th)	1.223	1.659		735.413,110	1.334	1.100.546,564					1.334	1.835.959,674		
				Peningkatan Produktivitas Karet	(Kg /Ha/Th)	941	941			940						940			
			Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian usaha Perkebunan	Jumlah Perusahaan Perkebunan yang dibina, diawasi dan dinilai	Perusahaan	1	5	43.295,000	4	10.080,000					9	53.375,000			
			fasilitasi pendampingan dan pembinaan peremajaan tanaman perkebunan	Jumlah pendampingan perkebunan rakyat	Kali	-	2	16.910,000	-	-					2	16.910,000			
			Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan	Jumlah Pembangunan jalan usaha tani/produkt perkebunan	Km	3	8	876.267,350	3	315.435,218					11	1.191.702,568			

	Promosi atas hasil produksi unggulan daerah	Jumlah promosi hasil produksi peternakan dan perkebunan tingkat kabupaten, provinsi & pusat	Kali	3	4	86.000.000	-	43.760.000							4	129.760.000
	Fasilitasi penyusunan RDK dan RDKK	Jumlah Fasilitas penyusunan RDK dan RDKK	Kali	-	4	5.770.000	-								4	5.770.000
	Pengendalian dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Pengendalian Penanganan gangguan usaha perkebunan	Kali	1	16	25.195.000	1	3.975.000							17	29.170.000
	Pengelolaan Pembibitan Tanaman Perkebunan	Jumlah Bibit tanaman produksi perkebunan yang diadakan	Batang, Kecambah, Biji, Stek	-	-	-	2.100	28.530.000							2.100	28.530.000
	Dukungan Pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan	Jumlah dukungan pengelolaan pemasaran hasil perkebunan	Unit	-	1	50.350.000	6	456.175.425							7	506.525.425
	Penilaian Petani dan Lembaga Petani Perkebunan	Jumlah Petani dan Lembaga Petani berprestasi Perkebunan	Orang	1	1	11.200.000	1	1.000.000							2	12.200.000
	Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan kemampuan kelembagaan petani perkebunan	Jumlah lembaga petani perkebunan yang dilatih	Kelompok	3	25	29.585.000	1	3.070.000							26	32.655.000
	Pembangunan, perluasan dan pemeliharaan kebun pemerintah	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan kebun Pemerintah	Bulan	12	12	277.628.400	12	208.530.921							24	516.349.321
	Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tembakau	Peningkatan Jumlah Produksi Tanaman Tembakau	Ton	16	18	444.796.300	12	89710032							30	534.506.332
	Pembinaan kelompok tani tembakau dalam penanganan panen dan pasca panen tembakau	Jumlah Kelompok tani tembakau yang dibina	Kelompok	0	2	444.796.300	2	89.710.032							4	534.506.332
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	% Penyediaan Sarana Peternakan	%					35,00	1.216.280.000	35,23	3.010.288.000	35,23	1.216.578.233	35,23	5.443.146.233	
		% Penyediaan Sarana Perkebunan	%					41,00	611.749.750	40,9	1.585.245.000	40,90	1.596.330.750	40,90	3.793.325.500	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	% Pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan	%					35,00	342.919.750	35,00	1.185.000.000	35,00	1.086.000.000	35,00	2.583.919.750	
		% Pengawasan Penggunaan Sarana Perkebunan	%					41,00		41,00		40,00		40,00		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Fasilitas penyusunan RDK dan RDKK	Kali					0	0	4	15.000.000	4	10.500.000	8	25.500.000	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Peternakan yang diadakan	Unit					3		4		4		11		
		Jumlah Sarana Perkebunan yang diadakan	Unit					3	342.919.750	6	1.170.000.000	8	1.045.500.000	19	2.558.419.750	
		Jumlah Kelompok Tani Tembakau yang Dibina	Kelompok					2		2		2		6		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit	(Kg /Ha/Th)			5.921		6.661		7.494		7.494				
		Peningkatan Produktivitas Kopi	(Kg /Ha/Th)			1.718	268.830.000	1.924	400.245.000	2.156	540.330.750	2.156	1.209.405.750			
		Peningkatan Produktivitas Karet	(Kg /Ha/Th)			1.253		1.378		1.516		1.516				
		Persentase Kelahiran Sapi Hasil IB	%			7,50	27.690.000	7,50	250.000.000	7,50	382.203.400	7,50	659.893.400			
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Pemerintah	Bulan			12		12	368.830.000	12	400.245.000	12	540.330.750	60	1.209.405.750	
		Jumlah Bibit tanaman produksi perkebunan yang diadakan	Bg, Biji, Kcb, Stek			48.000		55.000		60.500		60.500		163.500		
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Sarana dan Prasana Teknologi IB yang diadakan	Unit			0		4		4		4		8		
		Jumlah Promosi Hasil Produksi Peternakan dan Perkebunan Tingkat Kabupaten, Provinsi & Pusat	Kali			4	27.690.000	5	250.000.000	4	382.203.400	11	659.893.400			

KORAWI, SR
ADITYA SANJAYA, SH, MH
NIP. 19621107201001 1 015

		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Populasi Ternak Sapi	Ekor		24.075		26.964		30.199		30.199		
			Populasi Ternak Kambing	Ekor		39.531	1.108.590.000	41.507	2.760.208.000	43.582	634.374.833	43.582	4.763.252.833	
			Populasi Ternak Unggas	Ekor		2.317.773		2.549.550		2.804.505		2.004.505		
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang diadakan	Ekor		90		3000		3000		6.098		
			Jumlah stock pangan hasil ternak diadakan	Ekor		0	398.080.000	15	920.488.000	15	584.255.563	30	1.002.823.563	
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Pakan Ternak yang Diadakan	Kg		856.480		901.404		946.474		2.706.356		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Diadakan	Btg. Stek			790.510.000	75.000	1.039.800.000	112.500	250.119.270	237.500	2.880.429.270	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan & Pengembangan Prasarana Peternakan	%		85	621.545.000	85	1.337.001.000	85	1.589.401.200	85	3.547.947.200	
			Penyediaan & Pengembangan Prasarana Perkebunan	%		90,00	1.663.514.750	90,00	2.639.081.000	90,00	1.626.084.850	90,00	5.928.680.600	
		Pengembangan Prasarana Perikanan	Jumlah Pengembangan Prasarana Peternakan	Unit				1	150.000.000	1	165.000.000	2	315.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Peningkatan Pengunjung Tempat Pelestarian Satwa	Orang				500	150.000.000	500	165.000.000	1.000,00	315.000.000	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan	%		4	621.545.000	4	1.187.001.000	4	1.424.401.200	8	3.232.947.200	
			Jumlah Pembangunan Prasarana Perkebunan	%		2	1.663.514.750	2	2.639.081.000	2	1.626.084.850	4	5.928.680.600	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan	Km		8	1.863.514.750	10	2.639.081.000	9	1.626.084.850	27	5.928.680.600	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Polong Hewan	Jumlah Pembangunan, Rehab dan Pemeliharaan RPH	Unit		1	112.170.000	1	168.267.000	1	201.920.400	1	482.365.400	
			Terlaksananya Operasional RPH	Bulan		1		12		12		36		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehab dan Pemeliharaan Prasarana UPTD Disnakhn Lainnya (Pembibitan Ternak Puskeswan dan Perbibitan Tanaman Perkebunan)	Unit		4	509.367.000	3	1.018.734.000	4	1.222.480.800	8	2.750.561.800	
			Terlaksananya Operasional UPTD Disnakhn Lainnya	Bulan		12		12		12				
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit ternak	%		9,20	55.825.500	9,50	340.016.500	9,75	1.015.890.000	9,2	1.411.732.000	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Hewan yang dijamin Kesehatan melalui vaksin dan pengobatan dari populasi	%		14,29	55.825.500	14,29	200.000.000	14,29	913.390.000	14,29	1.189.215.500	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Ternak yang Divaksin dan Pelayan Kesehatan Ternak	Ekor		3.000	55.825.500	3.500	200.000.000	4.000	913.390.000	10.500	1.189.215.500	
		Pengawasan Pemasakan dan Pengeluhan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan pemasakan dan pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kali		10,00	-	10,00	35.000.000	10	15.000.000	30	50.000.000	
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasakan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Rekomendasi Keluar Masuk Hewan dan Produk Hewan	Surat		-	-	20	35.000.000	20	15.000.000	40	50.000.000	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	% Penerapan dan Pengawasan Kesmavet	%		3,00	-	3,5	55.016.500	4	30.000.000	4,00	85.016.500	
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Terhadap Unit Hewan dan Produk Hewan	Kali		-	-	4	30.000.000	4	17.500.000	8	47.500.000	
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sampel Hewan dan Produk Hewan diperiksa	Sampel		-	-	75	25.016.500	125	12.500.000	200	37.516.500	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	% Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesrawan	%		100	0	100	50.000.000	100	57.500.000		107.500.000	
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pengawasan Ternak Betina Produktif yang Tercegah Pemotongannya	Ekor		1.500		1.500		1.500		5.500		
			Jumlah Pengawasan Pemotongannya pada Hari-hari Besar	Ekor		3.000		3.000		3.000		10.500		

		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	%						5,00	0	5	85.000.000	5	66.274.000	5	151.274.000
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	%						5	0	5	85.000.000	5	66.274.000	5	151.274.000
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Kali					0	0	4	45.000.000	4	36.450.700	0	81.450.700
			Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Perkebunan	Kali					0	0	4	40.000.000	4	29.823.300	0	69.823.300
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai	%						35,00	11.025.000	37,50	30.000.000	40,00	50.363.000	40,00	91.388.000
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Izin Usaha Perkebunan yang dibina, diawasi dan dinilai	%					35,00	11.025.000	40	30.000.000	45	50.363.000	45	91.388.000
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Perusahaan Perkebunan yang Dibina, Diawasi dan Dinilai	Perusahaan					5	11.025.000	5	30.000.000	5	50.363.000	15	91.388.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	% Penyediaan Sarana Peternakan	%						0,00	0	0	0	35,23	968.062.342	35,23	968.062.342
			% Penyediaan Sarana Perkebunan	%						0,00	0	0	0	40,90	1.299.452.320	40,90	1.299.452.320
			Pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan	% Pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan	%					0,00	0	0,00	0	35,00	99.075.000	35,00	99.075.000
			Pengawasan Penggunaan Sarana Perkebunan	% Pengawasan Penggunaan Sarana Perkebunan	%					0,00	0	0,00	0	40,00	561.425.000	40,00	561.425.000
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan					0	0	0	0	1	10.500.000	1	10.500.000
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan					0	0	0	0	4	650.000.000	4	650.000.000
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit	(Kg /Ha/Th)					0	0	0	0	7.494	322.886.953	7.494	322.886.953
				Peningkatan Produktivitas Kopi	(Kg /Ha/Th)					0	0	0	0	2.155	322.886.952	2.155	322.886.952
				Peningkatan Produktivitas Karet	(Kg /Ha/Th)					0	0	0	0	1.516	92.253.415	1.516	92.253.415
				Persentase Kelahiran Sapi Hasil IB	%					0,00	0	0,00	0	7,50	184.506.830	7,50	184.506.830
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Varitas unggul baru					0	0	0	0	6	950.330.750	6	950.330.750
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Laporan					0	0	0	0	1	231.309.987	1	231.309.987
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Populasi Ternak Sapi	Ekor					0	0	0	0	30.199	256.680.192	30.199	256.680.192
				Populasi Ternak Kambing	Ekor					0	0	0	0	43.582	256.680.192	43.582	256.680.192
				Populasi Ternak Unggas	Ekor					0	0	0	0	2.804.505	171.120.128	2.804.505	171.120.128
			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Ekor					0	0	0	0	3.000	984.255.563	3.000	984.255.563
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Ton					0	0	0	0	946.47	225.224.950	946.47	225.224.950
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan & Pengembangan Prasarana Peternakan	%						0	0	0	0	85	1.037.201.200	85	1.037.201.200
			Penyediaan & Pengembangan Prasarana Perkebunan	%						0	0	0	0	90,00	4.002.352.250	90,00	4.002.352.250
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Peternakan	Unit					-	-	1	-	1	135.000.000	2	135.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan					-	-	0	0	1	135.000.000	1,00	135.000.000

			Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan	%						0		0		4	902.201.200	0	902.201.200
			Jumlah Pembangunan Prasarana Perkebunan	%						0	0	0		2	4.002.352.250	4	4.002.352.250
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Unit						0	0	0		24	4.002.352.250	24	4.002.352.250
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Unit						0	0	0		1	201.920.400	1	201.920.400
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Unit						0	0	0		4	705.280.800	4	705.280.800
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit ternak	%					0,00	0	0,00		9,75	631.391.500	9,75	631.391.500
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Hewan yang dijamin Kesehatan melalui vaksin dan pengobatan dari populasi	%					0	0	0		14,29	509.391.500	14,29	509.391.500
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilyah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan					0	0	0		4	509.391.500	4	509.391.500
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan pemasukan dan pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kali					-	-	0,00		4	25.000.000	4	25.000.000
			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan					-	-	0		4	25.000.000	4	25.000.000
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	% Penerapan dan Pengawasan Kesmevet	%					0,00	-	0		4	50.000.000	4,00	50.000.000
			Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan					-	-	0		4	27.500.000	4	27.500.000
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan					-	-	0		4	22.500.000	4	22.500.000
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	% Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesrawan	%					0	0	0		100	47.000.000		47.000.000
			Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan					0	0	0		4	47.000.000	4	47.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	%					0,00	0	0		5	54.415.676	5	54.415.676
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	%					0	0	0		5	54.415.676	5	54.415.676
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha					0	0	0		2	30.100.000	2	30.100.000
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha					0	0	0		2	24.315.676	2	24.315.676
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan ditilai	%					0,00	0	0,00		40,00	11.025.000	40,00	11.025.000
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Izin Usaha Perkebunan yang dibina, diawasi dan ditilai	%					0,00	0	0		45	11.025.000	45	11.025.000
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan					0	0	0		4	11.025.000	4	11.025.000

PARANAF KOORDINASI


TGL:

TGL:

Ket. H. SP
1962061819870100

ADITYA SAKAWA, SH, S.H.

			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	75	98.40	1.096.857.449	81.32	1.000.921.552							81.30	1.097.579.001	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terselesaikan	Surat	0	36	1.500.000	-	-								36	1.500.000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan	12	12	75.134.862.0	12	56.493.623								24	131.036.665
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terlunasi pajaknya	Unit	5	5	14.702.800	22	6.922.000								27	21.624.800
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Disnakbun yang disediakan	Bulan	12	12	199.936.000	12	186.729.200								24	386.665.200
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	Bulan	12	12	13.000.000	12	5.000.000								24	21.000.000
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Bulan	12	12	40.000.000	12	28.500.000								24	68.500.000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	5	5	40.250.000	8	13.225.200								13	53.475.200
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Jenis	5	11	9.993.000	11	5.000.000								22	14.993.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi	Jumlah bacaan dan jasa publikasi yang disediakan	Media massa	22	42	27.995.000	32	19.925.000								74	47.920.000
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minum Harian Pegawai/ Rapat/ Tamu yang disediakan	Bulan	12	12	34.050.000	12	10.500.000								24	44.550.000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	70	56	204.035.787	64	169.841.329								120	373.877.116
			Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	Orang	73	73	401.200.000	73	460.850.000								146	862.050.000
			Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	Kali	45	85	34.830.000	15	14.935.000								100	49.765.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	%	75	99.46	267.239.225	100.00	39.925.000							99.73	327.164.225	
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	Unit	1			-	-								-	-
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Unit	3	7	72.310.000	-	-								7	72.310.000
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Unit	3			-	-								-	-
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	22			-	-								-	-
			Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang diadakan	Unit	32	3	16.750.000	-	-								3	16.750.000
			Pengadaan komputer	Jumlah Perangkat Komputer yang diadakan	Unit	15	1	14.400.000	-	-								1	14.400.000
			Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang diadakan	Unit	0			-	-								-	-
			Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	5	7	25.000.000	-	-								7	25.000.000
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	1	1	16.950.000	-	-								1	16.950.000
			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Unit	5	5	59.980.000	5	39.925.000								10	129.905.000
			Penyediaan asuransi kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang diasuransikan	Unit	1	2	13.263.225	-	-								2	13.263.225
			Rehabilitasi gedung/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang diperbaiki	Unit	1	1	38.586.000	-	-								1	38.586.000
			Program Peningkatan Disiplin	Jumlah Persentase Pakain Dinas dan Pakain Khusus yang Disediakan	%	0	0	-	99.98	68.485.000							99.98	68.485.000	
			Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakain Dinas Dan Atributnya yang Disediakan	Stel	0	0	-	136	68.485.000								136	68.485.000
			Pengadaan Pakain Khusus Hari Hari Bertentu	Jumlah Pakain Khusus yang Disediakan	Stel	50	0	-	0	-								-	-

PARAF KOORDINATOR
 TGL: 
 Kepala ST
 19630618198791001

		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	75	96,36	94.913.861	100,00	5.060.895						96,10	99.974.500	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	Orang	0	0	-										
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	Orang	0	14	94.913.861	1	5.060.895						15	99.974.500	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Peternakan dan Perkebunan		58	98,03	135.629.840	100,00	44.378.000,00						99,015	180.007.840	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Kinerja OPD yang Disusun	Dokumen	1	1	10.040	1	6.410.000						2	6.420.040	
		Penyusunan laporan Keuangan OPD	Jumlah laporan keuangan OPD Yang Disusun	Dokumen	1	2	8.274.800	2	4.493.000						4	12.707.800	
		Penyusunan Laporan Tahunan OPD	Jumlah laporan Tahunan OPD yang disusun	Dokumen	1	1	7.645.000	1	6.000.000						2	13.645.000	
		Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD	Jumlah Laporan Aset Yang Disusun	Dokumen	1	1	18.359.600	1	8.475.000						2	26.834.600	
		Pengelolaan Data Peternakan dan Perkebunan	Jumlah Laporan Data Peternakan dan Perkebunan yang disusun	Dokumen	2	8	72.561.000	1	19.000.000						9	91.561.000	
		Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan dan Pengendalian kegiatan yang disusun	Dokumen	1	1	28.679.400	-	-						1	28.679.400	
		Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Oleh BPK/ Inspektorat	%	0	0	-	-	-						0	0	
		Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Laporan Pengendalian Intern Yang Disusun	Dokumen	0	0	-	-	-						0	0	
		Program Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Renja Terhadap Renstra	%	75	98	63.236.892	100,00	36.987.300						99,0	99.224.192	
		Penyusunan Rencana Strategis OPD	Jumlah Dokumen Rencana Strategis (renstra) yang Disusun	Dokumen	1	2	19.745.000	-	-						2	19.745.000	
		Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja OPD	Dokumen	1	1	30.026.892	1	19.437.500						2	49.464.392	
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Yang Disusun	Dokumen	2	1	7.645.000	2	12.499.800						3	20.144.800	
		Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD	Dokumen IKU dan PK OPD Yang Disusun	Dokumen	2	1	5.820.000	2	4.050.000						3	9.870.000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%						94	8.699.587.350	96	9.840.977.050	97	0	98	18.555.857.700
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	%						100	152.327.450	100	214.479.500	100	0	100	386.806.950
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen						4		4		4	0	12	
			Dokumen Renstra Perubahan Perangkat Daerah	Dokumen							1	52.360.100		57.591.000	1	0	2
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan RKA Perubahan SKPD	Dokumen						2	18.493.200	2	33.812.000	2	0	6	49.305.200
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan DPA Perubahan SKPD	Dokumen						2	16.493.400	2	24.994.000	2	0	6	41.487.400
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen						5	25.697.100	5	35.361.000	5	0	15	61.058.100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen						1	39.293.650	1	65.721.500	1	0	3	105.015.150
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%						100	7.207.438.850	100	7.492.302.050	100	0	100	14.699.740.900
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun						1	6.827.132.000	1	7.089.568.550	1	0	3	13.896.700.550
		Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengupian Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikator Keuangan SKPD	Bulan						12	363.012.100	12	408.011.000	12	0	3	783.023.100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen						1	9.179.500	1	12.345.000	1	0	3	21.524.500
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Dokumen						1	8.115.250	1	10.377.500	1	0	3	18.492.750

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%						100	11.993.300	100	13.903.000	100	0	100	41.189.600
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penilaian Aset Disembun	Dokumen						1	11.993.300	1	13.903.000	1	0	1	41.189.600
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%							-	100	245.000.000	100	0	100	245.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas dan Atributnya yang disediakan	Stel						-	-	140	120.000.000	140	0	260	120.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang						-	-	7	50.000.000	7	0	14	50.000.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti Bimtek	Orang						-	-	10	75.000.000	10	0	20	75.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%						100	272.652.500	100	491.792.500	100	0	100	764.445.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat/Komponen Instalasi Listrik/Penerangan SKPD yang disediakan	Jenis						15	5.060.000	15	9.000.000	15	0	45	14.060.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit							0	12	70.000.000	15	0	27	70.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan						12	78.871.500	12	95.071.500	12	0	36	173.943.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis						15	19.140.000	15	35.140.000	15	0	45	54.280.000
		Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Media						22	16.500.000	22	32.500.000	22	0	66	49.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Dinas ke dalam dan keluar Daerah	Kah						70	153.081.000	75	250.081.000	80	0	225	403.162.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%						100	541.694.000	100	700.000.000	100	0	100	1.241.694.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas/Dinas Jabatan yang diadakan	Unit							450.000.000	1	450.000.000	1	0	2	900.000.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Perorangan Dinas Operasional yang diadakan	Unit							0	3	75.000.000	3	0	6	75.000.000
		Pengadaan Mebel	Mebel yang diadakan	Unit							35.000.000	10	50.000.000	10	0	20	85.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit						5	58.694.000	7	75.000.000	7	0	19	131.694.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit							0	5	25.000.000	5	0	10	25.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit							0	5	25.000.000	5	0	10	25.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%						100	259.352.500	100	328.500.000	100	0	100	587.852.500
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Keluar Perangkat Daerah	Surat						0	0	450	3.500.000		0		3.500.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan						12	57.172.500	12	75.000.000	12	0	36	132.172.500
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pelayanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit							0	7	25.000.000	7	0	14	25.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Orang						35	202.180.000	40	225.000.000	40	0	115	427.180.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%						90	254.128.750	92	355.000.000	94	0	94	609.128.750
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Terjunasi Pakainya	Unit						45	89.056.000	50	100.000.000	55	0	150	189.056.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit						27	15.072.750	25	30.000.000	25	0	77	45.072.750
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit							150.000.000	1	200.000.000	1	0	2	350.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit							0	1	25.000.000	1	0	2	25.000.000

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%									94	0	0	0	0	97	8.184.095.973	98	8.215.788.375
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	%									0	0	0	0	0	100	81.440.223	100	81.440.223
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen									4	0	0	0	0	4	18.109.634	4	18.109.634
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen									0	0	0	0	0	2	8.685.853	1	8.685.853
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen															8.685.853	1	8.685.853
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen															8.685.853	1	8.685.853
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen									0	0	0	0	0	2	8.685.853	1	8.685.853
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan														6	5.482.329	6	5.482.329
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan									0	0	0	0	0	1	23.104.858	1	23.104.858
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%									100	0	0	0	0	100	6.752.942.835	100	6.752.942.835
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan									0	0	0	0	0	12	6.516.526.422	12	6.516.526.422
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen									0	0	0	0	0	12	220.275.588	12	220.275.588
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan									0	0	0	0	0	1	6.766.429	1	6.766.429
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan									0	0	0	0	0	1	9.374.196	1	9.374.196
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%									0	0	0	0	0	100	9.500.000	100	41.189.600
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan									0	0	0	0	0	1	9.500.000	1	41.189.600
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%														100	80.090.000	100	80.090.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket									-	-	0	0	0	140	80.090.000	140	80.090.000
			Berdiklat dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang									-	-	0	0	0	7	0	7	0
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang									-	-	0	0	0	10	0	10	0

PAPARAF KOORDINASI

Kabag H

TGL: TGL:

KORAWI, SP
196306181987091001

ADITYA SANJAYA SH, MH.
NIP. 1992

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%						0	0	0	0	100	348.061.335	100	348.061.335
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket						0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket						0	0	0	0	1	0	1	0
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket						0	0	0	0	4	60.192.350	4	60.192.350
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket						0	0	0	0	1	12.687.502	45	12.687.502
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen						0	0	0	0	22	20.750.000	22	20.750.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali						0	0	0	0	1	249.631.483	1	249.631.483
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%						0	0	0	0	100	203.907.650	100	203.907.650
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit						0	0	0	0	1	0	1	0
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit						0	0	0	0	3	0	3	0
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit						0	0	0	0	10	36.600.000	10	36.600.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit						0	0	0	0	10	85.000.000	19	85.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						0	0	0	0	5	82.307.650	5	82.307.650
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						0	0	0	0	5	0	5	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%						0	0	0	0	100	602.429.129	100	602.429.129
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan						0	0	0	0	450	2.429.129	450	2.429.129
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan						0	0	0	0	12	75.000.000	12	75.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan						0	0	0	0	7	0	7	0
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan						0	0	0	0	12	525.000.000	12	525.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%						0	0	0	0	94	105.525.000	94	105.525.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit						0	0	0	0	55	90.025.000	55	90.025.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit						0	0	0	0	25	15.500.000	25	15.500.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit						0	0	0	0	1	0	1	0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit						0	0	0	0	1	0	1	0

BAB VII

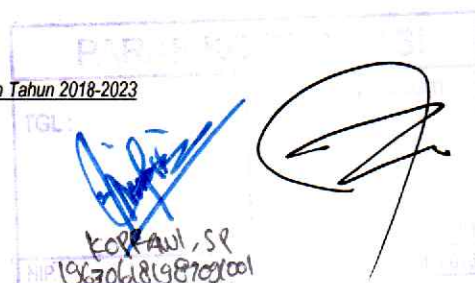
KINERJA PENYELEGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1. di bawah ini, dan indikator Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.2. berikut :

Tabel 7.1 : Perubahan Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
	Sblm Prbhn	Sth Prbhn		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pertumbuhan PDRB lapangan usaha peternakan	Persentase pertumbuhan PDRB lapangan usaha peternakan	3,41	3,50	3,59	3,68	3,77	3,86
2	Persentase pertumbuhan PDRB lapangan usaha perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB lapangan usaha perkebunan	3,49	4,50	4,61	4,73	4,85	4,97
3	Jumlah Produksi Daging (Kg)	Jumlah Produksi Daging (Kg)	1.781.325,8	1.943.652	2.150.012	2.502.635	2.802.951	3.139.305
4	Jumlah Produksi Telur (Kg)	Jumlah Produksi Telur (Kg)	611.475,46	994.892	616.913	759.634	816.607	877.852
5	Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	186.099	199.668	190.577	218.287	234.658	252.257
6	Jumlah Produksi Kopi (Ton)	Jumlah Produksi Kopi (Ton)	7.745	9.141	8.244	11.339	12.473	13.720
7	Jumlah Produksi Karet (Ton)	Jumlah Produksi Karet (Ton)	72.192	74.441	74.441	83.571,3	87.749,8	92.137,3
8	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (%)		110,00	102,10	99,05			
9	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR) (%)		105,00	99,85	96,94			



Tabel 7.2 : Perubahan Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No	Program		Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Realisasi Program		Target Capaian Program		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan Peternakan	Produksi	a. Jumlah Populasi Ternak Sapi (ekor)	16.703	17.136	18,580	18,248			
			b. Jumlah Populasi Ternak Kerbau (ekor)	4.359	4.449	4,425	4,195			
			c. Jumlah Populasi Ternak Kambing (ekor)	31.181	34.148	43,729	40,456			
			d. Jumlah Populasi Ternak Unggas (ekor)	1.741.377	1.741.377	2,181,576	2,134,271			
2	Peningkatan Perkebunan	Produksi	a. Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit (Kg /Ha/Th)	4.253	4.253	4,254	4,254			
			b. Peningkatan Produktivitas Kopi (Kg /Ha/Th)	1.133	1.223	1,659	1,334			
			c. Peningkatan Produktivitas Karet (Kg /Ha/Th))	938	941	941	940			
3	Penanganan Panen & Pasca Panen Bahan Baku Tembakau		Peningkatan Jumlah Produksi Tanaman Tembakau (Ton)	12	16	18	12			
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		Persentase Penurunan Kasus Penyakit Ternak	9,00	9,00	9,20	8,80			
5	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		Persentase kelahiran sapi hasil IB	6,50	7,50	7,18	7,40			
1		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Sarana Peternakan (%)					35,00	35,23	35,23
			Penyediaan Sarana Perkebunan (%)					41,00	40,9	40,9
2		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan (%)					85	85	85
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan (%)					90,00	90,00	90,00
3		Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit ternak (%)					9,20	9,50	9,75
4		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan (%)					5,00	5,00	5,00
5		Program Perizinan Usaha Pertanian	Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai (%)					38,46	38,46	38,46

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Merangin dan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 serta isu-isu bidang Peternakan dan Perkebunan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 ini telah memuat, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 untuk jangka waktu 2018-2023. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Perubahan Renstra Peternakan dan Perkebunan Tahun 2018-2023 ini dapat mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin untuk tahun 2018-2023, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Merangin pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

